LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Sumber Daya Air

Upaya Pencapaian	8	Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P jaringan irigasi		Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P prasarana air baku	Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P jaringan irigasi
Cara Mengukur	7	- survey		- survey	- survey
Target Tahun 2019	9	70		100	70
Satuan	ю	9%		%	%
Indikator	4	persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya		persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	2. persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
Sasaran	8	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat		Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	
Jenis Pelayanan Dasar	SPM Provinci	ın air baku outuhan at	SPM Kabupaten/Kota	а	
No	- L	<u></u>	SP	П	

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Jalan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
Н	2	3	4	10	9	7	8
SPM	SPM Provinsi						
1	Penyedisan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi persentase tingkat kondisi jalan provinsi balik dan sedang.	persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.	%	09	Pengukuran kondisi jalan untuk memperoleh miai IRI dapat dilakukan menggunakan: II. Alat (Naasra/ Romdas/ Rougitometer) 2. Metode visual dengan cara menaksir nilai Road Condition float (RCI) yang Kemudian dikonversikan ke nilai fremational dikonversikan ke nilai fremational (IRI) yang Kengukurass Index (IRI) yang dilakukan pda kondisi tertentu)*	Pengukuran Setiap Pemerintah Provinsi memilisia dengukuran alat pengukur (fraasra/ Romdas/ untuk memperoleh Roughometer) untuk menentukan milai IRI dapat milai IRI dapat milai IRI dapat mansia suyan dapat milai IRI Membina dan menyediakan sumber dapa mansia suyan dapat: Menbina dan menyediakan sumber dapa mansia suyan dapat: Anat (Nacasra/ I. Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat Naasra/ Romdas/ Roughometer) Roughometer) Roughometer) Roughometer (untuk pengukuran menggunakan alat) Mengurapen alat) Roughometer (untuk pengukuran menggunakan kenilai IRI (untuk kondisi jalan daken (IRI) yang pengukuran menggunakan metode kemudan disunakan menggunakan pengilaran pengilakuran pengilakukan pemeliharaan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan pemeliharaan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan mempertahankan kondisi jalan pemeliharaan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan
Ø	Penyedisan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi	persentase terhubungnya pusat-pusat kegatan dan pusa: produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	8	100	Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuat yang tercantum pada RTRW Provinsi telah terhubung oleh jaringan	Setiap Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih behun terhubungkan dengan jaringan jalan. Percepatan penyelesaian Perda tentang RTRW Provinsi

-i 71 '74					()	ŗ	
.4	renyemaan jalan untuk melayani	Meningkatnya kualitas layanan jalan	persentase tingkat kondisi jalan	%	3	Pengukuran	Setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota
	kebutuhan masyarakat	Kab/Kota	kabupaten/kota baik dan sedang.			kondisi jalan	memiliki alat pengukur (Naasra/
						untuk memperoleh	untuk memperoleh Romdas/Roughometer) untuk
						nilai IRI dapat	menentukan nilai IRI
						dilakukan	*
						menggunakan:	Membina dan menyediakan sumber
						- alat (Naasra/	daya manusia yang dapat:
						Romdas/	 Melakukan survei kondisi jalan
						Roughometer)	menggunakan alat Naasra/ Romdas/
						- vísual dengan	Roughometer (untuk pengukuran
						cara menaksir	menggunakan alat).
						nilai Road	Menginterpretasikan kondisi jalan
						Condition Index	ke nilai RCI yang selanjutnya
						(RCI) yang	dikonversi ke nilai IRI (untuk
						kemudian	pengukuran menggunakan metode
						dikonversikan ke	visual).
						nilai International	
						Roughness Index	Melakukan pemeliharaan rutin dan
						(IRI) yang	pemeliharaan berkala untuk mencapai
						dilakukan pda	dan mempertahankan kondisi jalan
						kondisi tertentu)*	kondisi tertentu)* baik dan sedang berdasarkan nilai IRI
2	Penyediaan jalan untuk melayani	Tersedianya konektvitas wilayah Kab/ Kota	persentase terhubungnya pusat-pusat	%	100	Pusat-pusat	Setion Democratch Kotuneten / Koto
-4	kebutuhan masyarakat		kegiatan dan pusa: produksi di			kegiatan dan	melakukan pembangunan/
			wilayah kabupaten/ kota			pusat produksi	penambahan ruas jalan yang
						sesual yang	menghubungkan pusat-pusat
						RTRW Kabupaten/	
						Kota telah	masin belum ternubungkan dengan laringan lalan.
						terhubung oleh	1
						jaringan jalan.	Percepatan penyelesaian Perda
							tentang RTRW Kabupaten/ Kota

Ket)*:

Apabila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/ Rondas/ Ronghometer) hasilnya sudah tidak feasible (nilai count/ BI > 400)
 Apabila situsai lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survet, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)
 Apabila tidak mempunyai kendaraan dan alat survet, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Cipta Karya

1 Perpendian strainton Perpendian strainton permuticinan Permuticinan permuticinan sanitani permuticinan permutici	No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
num perkotsan air minum permukinan akses sir minum yang aman % Penduduk 81,77% si Acribakstnya kusiltas layanan air minum permukinan perkotsan air minum yang aman mendelai dreimase) permukinan perkotsan perkotsan air minum yang aman air minum yang aman dirikase) permukinan perkotsan perkotsan perkotsan persentase pengurangan sampah di perkotsan % Penduduk 20% persentase pengurangan sampah di perkotsan % Penduduk 70% persentase pengurangan sampah di perkotsan TPA 70% persentase pengupangan dara langkangan dara langkangan Meningkatnya tertib pembangunan bengunan gedung persentase pendudukan Bangunan Meningkatnya tertib pembangunan bengunan gedung persentase berkurangaya hasaan permukinan Menindikatnya tertib pembangunan kumuh di perkotsan persentase berkurangaya hasaan permukinan Haa 10% kumuh di kawasan permukinan Haa 10%	1		ю	4	υ	ъ	1	æ
mm Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman persentase penduduk yang mendapatkan % Penduduk 81,77% sis derinase) permukiman perkotaan den persentase penduduk yang terlayani sistem air % Penduduk 60% persentase pengurangan sampah di perkotaan % Penduduk 20% persentase pengurangan sampah di perkotaan % Penduduk 70% persentase pengurangan sampah di perkotaan % Penduduk 70% persentase pengurangan sampah di perkotaan 70% persentase penduduk yang terlayani sistem % penduduk 70% persentase penduduk yang terlayani sistem % penduduk 50% persentase berkurangan sedan penduduk 70% genan kumuh perkotaan persentase berkuranganya hasaan pernukiman Ha 10% kumuh perkotasan pernukiman Ha 10%								
Penyedisan sir minum Meningkatnya knalitas layanan air minum permukiman personiasa penduduk yang mendapatkan % Penduduk 81,77% Penyedisan sanitasi Meningkatnya knalitas sanitasi (air limbah, persampahan dan personiasa pengursagan sampah di perkotasan den limbah, yang menadasi menduduk yang terlayani sistem % Penduduk 60% Penyedisan sanitasi personiasa pengursagan sampah di perkotasan personiasa pengursagan sampah di perkotasan % Penduduk 70% Pensentasa pengursagan sanitasi (militaria) personiasa pengursagan terlah di perkotasan % Penduduk 70% Pensentasa pengursagan dan lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung personiasa penduduk yang terlayani sistem % pengursagan penduduk 50% Penangan dan lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung personiasa penduduk Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung (ME) yang direrkitaan % pengursagan 50% Penangan Penukiman Kumuh Perkotasan Berkurangnya permulikman kumuh di perkotasan personiasa perkotasan perkotasan Ha 10%	SPI	M Kabupaten/Kota						
Penyediaan sanitasi Meningkatnya kualitas saoriasi (air limbah, persampahan dan persentase penduduk yang terlayani sistem air % Penduduk 60% persentase) permukiman perkotasan dan limbah, persampahan dan persentase pengutuknyang terlayani sistem air % Penduduk 60% persentase pengutuknyang terlayani sistem % Penduduk 70% persentase pengutukna sampah di perkotasan 770% persentase penguperasian TPA % penduduk 70% persentase pengutukna sampah di perkotasan TPA % penduduk 70% jaringan drainasa sakala kota sahinga telakan sistem % penduduk 70% jaringan drainasa sakala kota sahinga telakan sampah 600 m, selama 50% persentasa penduduk yang terlayani sistem % penduduk 500% jaringan drainasa penduduk dari 20 kali setahun 8chung diterbitkan 8chunduknan kumuh Perkotasan Berkurangnya permukiman kumuh di perkotasan permukiman man dan Lingkungan Berkurangnya permukiman kumuh di perkotasan permukiman kumuh di perkotasan permukiman man hangunan permukiman man hangunan permukiman man hangunan permukiman man hangunan permukiman perkotasan permukiman man hangunan permukiman man hangunan perkotasan permukiman man hangunan permukiman man hangunan perkotasan permukiman man hangunan kumuh di perkotasan permukiman man hangunan kumuh di perkotasan permukiman man hangunan kumuh di perkotasan bendurangnya hasaan permukiman man hangunan kumuh di perkotasan bendurangan permukiman man hangunan kumuh di perkotasan permukiman man hangunan hangunan hangunan kumuh di perkotasan permukiman man hangunan	٦	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman	persentase penduduk yang mendapatkan	% Penduduk		Contoh	
Penyedisan sanitasi drainase) permukiman perkotaan drainase) permukiman perkotaan drainase) permukiman perkotaan persampahan dan langkatnya kutalitas sanitasi (kir limbah, persampahan persentase pengangkutan sampah di perkotaan % Penduduk 20% persentase pengangkutan sampah di perkotaan % Penduduk 70% persentase pengangkutan sampah % Penduduk 70% persentase pengangkutan sampah % Penduduk 70% persentase pengangkutan sampah % Penduduk 70% persentase penduduk yang terlayani sistem % penduduk 50% terlayan dan langkunan dan langkunan bangunan bangunan bangunan bangunan bengunan bangunan bengunan persentase penduduk an Som, selama 2 sali akan sampah dan 30 cm, selama 2 sali akan selama 2 keli akan langkunan langkutan akan langkunan kumuh di perkotaan permukiman kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di kawasan permukiman man hasan berkurangan			perkotaan	akses air minum yang aman		81,77%	- survey; - kuesioner; dll.	
drainase) permukinan perkotaan imbah yang memadai % Penduduk 20% persentase pengurangan sampah % Penduduk 20% persentase pengurangan sampah % Penduduk 20% persentase pengurangan TPA % pengurangan TPA 70% persentase penduduk yang terlayani sistem % penduduk 50% persentase bangtunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase penduduk and 30 cm, selama 2 % pengurangan 50% genangan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase pendudukian Berkurangan penulikanan kumuh di perkotaan persentase berkurangnya husaan pemulikman kumuh perkotaan kumuh di perkotaan kum	7		Meninekatnya kualitas sanitasi fair limbah, persampahan dan	persentase penduduk vang terlayani sistem air	% Penduduk		Contoh	
Persentase pengurangan sampah di perkotasan % Penduduk 20% persentase pengangkutan sampah % Penduduk 70% persentase pengangkutan sampah % Penduduk 70% persentase pengenasian TPA % Penduduk 70% jaringan drainase salak kota schingga tidak trijakasan Penatasan Bengunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase juniah izin Mendirikan Bangunan IMB 60% jemangkan perkotasan Penangkan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di perkotasan kumuh di perkotasan perkotasa			drainase) permukiman perkotaan	limbah yang memadai		%09	- survey;	
Persentsse pengangkuttan sampah di perkotaan % Penduduk 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%							- kuesioner; dll.	
Penstasan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertih pembangunan bangunan gedung Pensentase berkurangnya hasan perkotaan Penstasan Bemukiman Kumuh di perkotaan Remunikiman Kumuh di perkotaan Remunikiman Rumuh di kawasan perkotaan Remunikiman Rumuh di perkotaan Remunikiman Rumuh di perkotaan Remunikiman Rumuh di kawasan perkotaan Remunikiman Rumuh di perkotaan Remunikiman Rumuh di kawasan perkotaan Remunikiman Rumuh di kawasan perkotaan				persentase pengurangan sampah di perkotaan	% Penduduk		Contoh	
Persentase pengangkutan sampah % Penduduk 70% 1 persentase pengangkutan sampah % Penduduk 70% 1 persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan disingan disitem jaringan disitem gerangan sistem % pengunangan 50% 1 jaringan disitem 8 penduduk yang terlay pembangunan gedung persentase penduduk 30 cm, selama 2 Senangan Penatasan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya terlib pembangunan gedung persentase jumlah izin Mendirikan Bangunan 1MB 60% 1 [ME] yang diterbitkan Perkotaan 10% 1 Perkotaan kumuh di kawasan perkotaan 10% 1						20%	- survey;	
Persentase pengangkutan sampah % Penduduk 70% persentase pengapetrasian TPA % pengaperasian TPA 70% persentase pengapetrasian TPA 70% persentase penduduk yang terlayani sistem % penduduk 50% jernipan derianasan Bengunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan gedung persentase penduduk jang diterbitkan genangan Penatasan Bengunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan gedung persentase jumlah lein Mendirikan Bangunan 1MB 60% jernangan Pemukiman Kumuh Perkotaan Berkuranganya permukiman kumuh di perkotaan kumuh di kawasan perkotaan Berkuranganya permukiman kumuh di perkotaan kumuh di kawasan perkotaan							- kuesioner; dll.	
Penstasan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung Pensentase Pendukhan Kumuh Perkotaan Penstasan Bemukiman Kumuh di perkotaan Remukiman Kumuh Remukiman Kumuh Remukiman Kumuh Remukiman Re				persentase pengangkutan sampah	% Penduduk		Contoh	
Persentase pengoperasian TPA 70% - persentase penduduk yang terlayani sistem penduduk 50% jam jebih dari 2 kali setahun genangan 60% jam jebih dari 2 kali setahun genangan 60% jemangan dan lingkungan Meningkatnya tertih pembangunan bangunan gedung persentase jumlah izin Mendirikan Bangunan 70% jemangan Penangan Penangan 60% jemangan Penangan Kumuh Perkotaan Berkuranganya permukiman kumuh di perkotaan kumuh di kawasan perkutaan perkotaan kumuh 100% jemangan perkotaan kumuh perkotaan kumuh perkotaan kumuh perkotaan kumuh mangan perkotaan kumuh perkotaan kumuh mangan perkotaan kumuh mangan perkotaan perkotaan kumuh perkotaan kumuh mangan perkotaan kumuh perkotaan kumuh di perkotaan kumuh mangan perkotaan kumuh perkotaan kumuh mangan perkotaan kumuh perkotaan kumuh perkotaan kumuh mangan perkotaan kumuh perkotaan kumuh perkotaan kumuh perkotaan kumuh perkotaan kumuh mangan perkotaan kumuh perkotaan kumuh perkotaan kumuh mangan perkotaan kumuh perkotaan kumuh perkotaan kumuh mangan kumuh						%02	- survey;	
Persentase penduduk yang terlayani sistem % penduduk 70% persentase penduduk yang terlayani sistem % penduduk 50% jernagan derhansa saka kota schingga theik deri 2 kali setahun genangan (beh) deri 2 kali setahun genangan persentase jumlah teh Mendirikan Bangunan 1MB 60% [MB] yang diterbitkan 10% pengunangan persentase berkuranganya permukiman kumuh di perkotaan persentase berkuranganya permukiman kumuh di perkotaan kumuh di kawasan perkotaan 10%							 kuesioner; dll. 	
Penstasan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung Persentase penduduk yang terlayani sistem % penduduk 50% jam) lebih dari 2 kali setahun genangan (MB) yang diterbitkan Mendirikan Bangunan IMB 60% Penstasan Bengunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase jumlah lain Mendirikan Bangunan IMB 60% Penstasan Penukiman Kumuh Perkotaan Berkuranganya permukiman kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di berkotaan kumuh di					% pengoperasian TPA		Contoh	
Penstaan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase penduduk yang terlayani sistem penduduk yang terlayani sistem penduduk yang terlayani sistem pengunangan terjadi genangan debih dari 2 keli setahun genangan persentase jumlah lain Mendirikan Bangunan IMB (ME) yang diterbitkan (ME) yang diterbitkan persentase berkuranganya permukiman kumuh di perkotaan kumuh di kawasan perkutaan perkotaan kumuh Perkotaan 10%						%04	- survey;	
Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan perkentaan Bangunan dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Penataan Benukiman Kumuh Perkotaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan pengunan gedung persentase jumlah Jah Mendirikan Bangunan IMB 60% Penataan Benukiman Kumuh Perkotaan							- knesioner; dll.	
Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung (MB) yang diterbitkan Perkotaan Rumuh Perkotaan Berkurangang permukiman kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di berkotaan kumuh di perkotaan kumuh di berkotaan kumuh di berkotaan kumuh di kawasaan perkotaan kumuh di kawasaan benyataan kumuh di kawasaan kumuh di kawasaan kumuh d				nersentase nenduduk vang terlayani sistem	% penduduk		Contoh	
Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase jumlah lain Mendirikan Bangunan 1MB 60% Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase jumlah lain Mendirikan Bangunan 1MB 60% Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase berkurangnya hasan permukinan Ha 10%				jaringan drainase skala kota sehingga tidak		20%	- survey; - brasioner dll	
jam) lebih dari 2 keli setahun genangan 7 yenganangan 50% genangan Penetaan Bengunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bengunan gedung persentase jumlah izin Mendirikan Bengunan IMB 60% [ME] yang diterbitkan (ME) yang diterbitkan Perkotaan Berkuranganya permukiman kumuh di perkotaan permukiman persentase berkuranganya hasan permukiman Ha 10%				terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 📙	tondottment %		Contoh	
Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase jumlah izin Mendirikan Bangunan IMB (IMB) yang diterbitkan (IMB) yang diterbitkan Perkotaan Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di kawasan permukiman Ha 10%				jam) lebih dari 2 kali setahun	w penguangan	ZOOK	Conton	
Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung persentase jumlah lan Mendirikan Bangunan IMB 60% [IMB] yang diterbitkan [IMB] yang diterbitkan Perkotaan Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di kawasan perkotaan Penangkunan Ha 10%					genengan	%	- survey; - knesioner: dll.	
(ME) yang diterrotkan 60%	Ø	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan	IMB			
Penangan Pemukinan Kumuh Perkotaan Berkurangnya permukinan kumuh di perkotaan kumuh di perkotaan kumuh di kawasan perkotaan Ha 10%				(IMB) yang diterbitkan		%09	pendataan	
Penangan Pemukinan Kumuh Perkotaan Berkurangnya permukinan kumuh di perkotaan permukinan Ha 10% kumuh di kawasan perkotaan ha 10%								
	4		Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	persentase berkurangnya luasan permukiman	Ha	10%	Contoh	
				kumuh di kawasan perkotaan			 survey; kuesioner; dll. 	

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Jasa Konstruksi

	_				I
Upaya Pencapaian	œ	Ò	a. Penanggungjawab SIPJAKI tingkat provinsi mengkoordinasikan dan mengumpulkan data-data terkait 3 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait b. Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi melakukian input data dan memutakhirkannya secara berkala. c. Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI		Input data layanan informasi jasa a. Penanggungjawab SIPJAKI tingkat konstruksi langsung masuk ke server SIPJAKI pusat, sehingga dan mengumpulkan data-data terkait 7 perkembangan hilat pencapaian layanan informasi dapat langsung dari instansi-instansi terkait diketahui Pemerintah Pusat dan b. Administrator SIPJAKI Tingkat Rabupaten/Kota melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala. C. Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI
Cara Mengukur	2		Input data layanan informasi jasa konstruksi langsung masuk ke server SIPJAKI pusat untuk langsung direkapitulasi		Input data layanan informasi jasa a. Penanggungjawab SIPJAK konstruksi langsung massuk ke sever SIPJAKI pusat, sehingga dan mengungulan dara-da yanan informasi pencapaian jenis layanan informasi jasa dari instansi-instansi terkait diketahui Pemerintah Pusat dan Administrator SIPJAKI Tin Kabupaten/Kota melakukan dan memutakhirkannya sece c. Administrator SIPJAKI Tin Kabupaten/Kota diberikan pagar dapat menggunakan apgar dapat menggunakan a
Target Tahun 2019	,		100		09
Satuan	uf,	,	%		%
Indikator	4	-	persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)		persentase tersedianya 7 (rujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
Sasaran	ď		Meningkatnya ketersediaan informasi (jasa konstruksi		Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi
Jenis Pelayanan Dasar	~	SPM Provinsi	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi J	SPM Kabupaten/Kota	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi l
N O	-	SPM	1	SPM 1	1

1. Instansi penerbit IUJK melakukan pencatatan kinerja pengan Pemerintah Pusat berkerjasama melakukan pencatatan kendali SPM Lembar Kendali SPM IUJK Lembar Kendali SPM IUJK DEMONIO IUJK Monitoring pelaksanaan SPM IUJK Jinstansi penerbit IUJK melakukan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK cherintah Provinsi melakukan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK Hekapitulasi kinerja pelayanan IUJK dilaporkan kepada IUJK dilaporkan kepada IUJK dilaporkan kepada UUJK dilaporkan kepada UUJK dilaporkan kepada UUJK dilaporkan kepada IUJK dilaporkan kepada UUJK dilaporkan kepada IUJK dilaporkan kepada UUJK dilaporkan kepada IUJK dilaporkan kepada	
I. Instansi penerbit IUJK melakukan pencatatan kin pelayanan dengan menggi Lembar Kendali SPM IUJK Pengisian Lembar Kend IUJK dilakukan pada setiz penohon IUJK melakukan rekapitulasi co wulan kinerja pelayanan I atau 4 (empat) bulan seka dibitung mulai bulan Jan 4. Rekapitulasi kinerja pel IUJK dilaporkan kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah Provinsi dan melampirkan salinan Lem melampirkan salinan Lem melampirkan salinan Lem Kendali SPM IUJK. Kendali SPM IUJK.	
100	
8	
Meningkatnya kualitas persentase tersedianya layanan layanan Izin Usaha Jasa usaha jasa konstruksi Konstruksi (UUK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	
Meningkatnya kualitas jayanan perizinan usaha jasa konstruksi j	
konstruksi	

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Penataan Ruang

Upaya Pencapaian	80		percepatan penyelesajan perda tentang RTR wilayah Provinsi, penyediaan petaypublikasi di merdia massa mengenai peta yang telah tersedia		percepatan penyelesaian perda tentang RTR wilayah kabupaten/kota; penyediaan petayublikasi di media massa mengenai peta yang	penertiban area yang direncanakan menjadi RTH; penganggaran penyediaan dan pengelolaan RTH	
Cara Mengukur Up	4		pen pen pen pro pro pro pro pro met		per pen tend kab kab kab kab mor mer mer	yan met	
Target Tahun 2019	9		100		100	ρ	
Satuan	סו		%		%	%	
Indikator	4		persentase terseficava informasi mengenai rencana tota ruang (ETR) wilayah Provinsi berserta rencana rintinya melalui peta analog dan peta figital		persentase tersedisnya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten,Kara berserta rencana indinya melahui peta analog dan peta digital	persentnas tersedanya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotsan	
Sasaran	m		Meningkatnya ketersediaan informasi penataan mang		Meningkatnya ketersediaan informsei penadaan naang	Meningkatnya ketersediaan RTH	
No Jenis Pelayanan Dasar	n .	SPM Provinsi	1 Informasi Penataan Ruang	SPM Kabupaten/Kota	I Informaci Penataan Ruang	5 Penyediaan Ruang Terbuka Pijau (RTE) Publik	

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

#q.



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- I. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat (Provinsi)
 Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat provinsi diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya.
 - a. Pengertian:
 - 1. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
 - 2. Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

b. Ruang Lingkup

- 1. Sasaran Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi adalah meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2. Indikator Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi adalah persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan

kewenangannya.

- 3. Sistem irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan/atau sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha.
- 4. Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan.

c. Target Capaian

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi adalah 70% (kinerja baik) pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% dari kebutuhannya.

Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut:

• 80-100 : kinerja sangat baik

• 70-79 : kinerja baik

• 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian

• <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

Cara perhitungan:

 $\begin{array}{c} \sum \textit{Ketersediaan air irigasi} \left(\frac{\textit{lt}}{\textit{det}}\right) \textit{pada setiap musim tanam} \\ \sum \textit{Kebutuhan air irigasi} \left(\frac{\textit{lt}}{\textit{det}}\right) \textit{berdasarkan rencana tata tanam} \end{array}$

Contoh perhitungan:

Nama: Daerah Irigasi A

Luas: 1,000 ha

Pembagian air dilaksanakan pada setiap 2 mingguan

Kebutuhan air per ha: 1.2 lt/det/ha (pengolahan tanah)

Total kebutuhan air = $1,000 \times 1.2 = 1,200 \text{ lt/det}$

Debit di intake bendung = 1,000 lt/det

Faktor K = 1,000/1,200 = 0.8333

Rencana luas tanam yang ditetapkan = 830 ha

Apabila realisasi tanam seluas 700 ha, maka air yang sampai di petak

tersier adalah

700 ha x 1.2 lt/det/ha = 840 lt/det

Pencapaian SPM = 840/1000 = 84%

Berarti nilai kinerja jaringan irigasi: Sangat Baik

d. Cara Mengukur

Pencapaian target SPM diukur dengan melakukan:

- Menyusun Rencana Tata Tanam.
- Survei lapangan untuk mengidentifikasi realisasi layanan irigasi terhadap luas tanam.
- Menghitung pencapaian target SPM dan menilai kinerja jaringan irigasi dengan membandingkan antara realisasi luas tanam dengan rencana tata tanam.

e. Upaya Pencapaian

Target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan; pengawasan; dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

f. Referensi

- 1. Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi;
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 4. Standar Perencanaan Irigasi
 - KP 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
 - **KP 02: Bangunan Utama**;
 - KP 03: Saluran;
 - **KP 04: Bangunan**;
 - **KP 05: Petak tersier;**
 - **KP 06: Parameter Bangunan**;
 - **KP 07: Standar Penggambaran**;
 - BI 01: Tipe Bangunan Irigasi;
 - BI 02: Standar Bangunan Irigasi;
 - PT 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
 - PT 02: Pengukuran;
 - PT 03: Penyelidikan Geoteknik; dan
 - PT 04: Penyelidikan Model Hidrolis.
- II. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat (Kabupaten/Kota) Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat kabupaten/kota diutamakan guna memenuhi kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari serta memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya.

a. Pengertian:

- 1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- 2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum.

3. Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.

b. Ruang Lingkup

- 1. Sasaran Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat adalah meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2. Indikator Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat adalah:
 - Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimaln sehari-hari.
 - Persentase ersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. Sistem irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan/atau sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sampai dengan 1000 ha dan terletak dalam satu kabupaten/kota.
- 3. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalah kewajiban Pemerintah berdasarkan target MDGs untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia. Kebutuhan pokok minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m3.
- 4. Sistem Jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi peserta bangunan pelengkapnya yang membawa air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air.
- 5. Sistem irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1000 ha.
- 6. Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku merupakan rasio

ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan.

7. Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan.

c. Target Capaian

1. Target Capaian Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari ditingkat Kabupaten/Kota adalah 100% dari target MDGs untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata) masyarakat setempat.

Cara perhitungan:

$$\frac{\sum Ketersediaan\ atr\ baku\ \left(\frac{m2}{tahun}\right)}{\sum Kebutuhan\ air\ baku\ \left(\frac{m2}{tahun}\right)} dari\ Instalasi\ Pengolah\ Atr}{\sum Kebutuhan\ air\ baku\ \left(\frac{m2}{tahun}\right)} berdasar\ Target\ MDGs$$

Contoh perhitungan:

- Diperkirakan pada tahun 2019 Kabupaten A diidentifikasikan akan memiliki jumlah penduduk 200.000 Jiwa
- Jumlah Kebutuhan air baku minimal yaitu 60 liter/orang/hari yang diperlukan Kabupaten A adalah:

200.0 wa X 0,06 m3/orang/hari X 365 hari = 4.599.000 m3/tahun.

 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019 adalah 68,87% atau 0,6887 dari 200.000 jiwa penduduk Kabupaten A harus 100% terlayani, sehingga perhitungannya:

4.599.000m3/tahun x 0.6887 = 3.167.331 m3/tahun.

- Dengan demikian pada tahun akhir pencapaian SPM diharapkan tersedia air baku sebesar 3.167.331m3/tahun.
- 2. Target Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi adalah 70% (kinerja baik) pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% dari kebutuhannya.

Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut:

• 80-100 : kinerja sangat baik

• 70-79 : kinerja baik

• 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian

• <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

Cara perhitungan:

 $\begin{array}{c} \Sigma \textit{Ketersediaan air irigasi} \left(\frac{\mathsf{lt}}{\mathsf{det}}\right) \textit{pada setiap musim tanam} \\ \Sigma \textit{Kebutuhan air irigasi} \left(\frac{\mathsf{lt}}{\mathsf{det}}\right) \textit{berdasarkan rencana tata tanam} \end{array}$

Contoh perhitungan:

Nama: Daerah Irigasi A

Luas: 1,000 ha

Pembagian air dilaksanakan pada setiap 2 mingguan

Kebutuhan air per ha: 1.2 lt/det/ha (pengolahan tanah)

Total kebutuhan air = $1,000 \times 1.2 = 1,200 \text{ lt/det}$

Debit di intake bendung = 1,000 lt/det

Faktor K = 1,000/1,200 = 0.8333

Rencana luas tanam yang ditetapkan = 830 ha

Apabila realisasi tanam seluas 700 ha, maka air yang sampai di petak

tersier adalah

700 ha x 1.2 lt/det/ha = 840 lt/det

Pencapaian SPM = 840/1000 = 84%

Berarti nilai kinerja jaringan irigasi: Sangat Baik

d. Cara Mengukur

Pencapaian target SPM untuk Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari diukur dengan melakukan:

- Memperkirakan jumlah penduduk yang akan dilayani dan memperkirakan kebutuhan akan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan kebutuhan air baku yang akan dipenuhi, sesuai target MDGs (68,87%).
- Menghitung realisasi layanan instalasi pengolah air selama 1 (satu) tahun.
- Menghitung pencapaian target SPM dan menilai kinerja layanan penyediaan air baku dengan membandingkan realisasi layanan instalasi pengolah air dengan kebutuhan air baku yang sesuai target MDGs.

Pencapaian target SPM untuk Tersedianya Air Irigasi Pertanian Rakyat diukur dengan melakukan:

- Menyusun Rencana Tata Tanam.
- Survei lapangan untuk mengidentifikasi realisasi layanan irigasi terhadap luas tanam.
- Menghitung pencapaian target SPM dan menilai kinerja jaringan irigasi dengan membandingkan antara realisasi luas tanam dengan rencana tata tanam.

e. Upaya Pencapaian

• Target SPM untuk Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) sarana dan prasarana penyediaan air

- baku. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan; pengawasan; dan pemberdayaan.
- Target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan; pengawasan; dan pemberdayaan.

f. Referensi

- 1. Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi;
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 5. Standar Perencanaan Irigasi
 - KP 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
 - KP 02: Bangunan Utama;
 - KP 03: Saluran:
 - **KP 04: Bangunan**;
 - **KP 05: Petak tersier:**
 - **KP 06: Parameter Bangunan**;
 - **KP 07: Standar Penggambaran**;
 - BI 01: Tipe Bangunan Irigasi;
 - BI 02: Standar Bangunan Irigasi;
 - PT 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
 - PT 02: Pengukuran;
 - PT 03: Penyelidikan Geoteknik; dan
 - PT 04: Penyelidikan Model Hidrolis.

III. Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat (Provinsi/Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat diutamakan

untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan (provinsi/kabupaten/kota).

b. Ruang Lingkup

Sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah (i) meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi/kabupaten/kota, serta (ii) tersedianya konektivitas wilayah provinsi/ kabupaten/ kota. Indikator penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah (i) persentase tingkat kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang, serta (ii) persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

- ∨ Indikator persentase tingkat kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang :
 - 1. Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi 'kondisi baik' dan 'kondisi sedang'.
 - 2. Tingkat kondisi jalan yang dimaksud dalam sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah kondisi jalan minimal pada 'kondisi sedang'.
 - 3. Tingkat kondisi jalan dinilai berdasarkan nilai *International Roughness Index* (IRI) yang dapat diperoleh menggunakan alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer) atau metode visual (*Road Condition Index*/ RCI). Berdasarkan tingkat IRI, kondisi jalan terbagi atas:
 - Untuk jalan aspal (paved): baik (IRI \leq 4); sedang (IRI > 4 dan IRI \leq 8); rusak ringan (IRI>8 dan IRI \leq 12); dan rusak berat (IRI > 12).
 - Untuk jalan penmac (paved): baik (IRI \leq 8); sedang (IRI > 8 dan IRI \leq 10); rusak ringan (IRI > 10 dan IRI \leq 12); dan rusak berat (IRI > 12).
 - Untuk jalan tanah/kerikil (unpaved): baik (IRI \leq 10); sedang (IRI > 10 dan IRI \leq 12); rusak ringan (IRI > 12 dan IRI \leq 16); dan rusak berat (IRI > 16).

∨ Indikator persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota:

Konektivitas wilayah yang dimaksud dalam sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota.

c. Target Capaian

v Target Peningkatan Kualitas Layanan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota:

Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan provinsi/ kabupaten/ kota adalah tingkat kondisi jalan (baik dan sedang) 60% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota berada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.

Penentuan persentase tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian PU, yang menetapkan 5 (lima) IKU dalam program penyelenggaraan jalan, antara lain :

- a. Sasaran strategis : meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah
 - i.Tingkat kemantapan jalan
 - ii. Tingkat fasilitas penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap
- iii. Tingkat penggunaan jalan nasional.
- b. Sasaran strategis: meningkatnya kapasitas jalan nasional
 - iv. Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan
 - v. Panjang jalan baru dibangun

Cara Perhitungan SPM Kondisi Jalan:

$$SPM \; Kondisi \; Jalan = \frac{\displaystyle \sum^{akhir \; tahu \; n \; pencapaian \; SPM} Panjang \; jalan \; memenuhi \; Kondisi \; Jalan \; Baik \; dan \; sedang}{\displaystyle \sum^{eksisting} Panjang \; Jalan \; Provinsi/K \; abupaten/Kota}$$

Contoh Perhitungan:

- Nama = Kabupaten A Provinsi X

- Panjang jalan (eksisting) = 900,00 km kabupaten A

Rencana panjang jalan kondisi = 60% x 900,00 km (ambang baik dan sedang hingga tahun batas kategori tercapainya
 SPM)

Realisasi panjang jalan kondisi = 700,00 km (melebihi ambang baik dan sedang hingga tahun batas 540,00 km)
 2019

Artinya, Kabupaten A Provinsi X berhasil mencapai target standar pelayanan minimal penyediaan jalan.

SPM Kondisi Jalan =
$$\frac{700,00km}{60\% \times 900,00km}$$
 = 129%

∨ Target Penyediaan Konektivitas Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota:

Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui penyediaan konektivitas wilayah provinsi/ kabupaten/ kota adalah 100% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, konektivitas wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah 100% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.

Cara Perhitungan SPM Konektivitas Wilayah:

Contoh Perhitungan:

- Nama = Kabupaten A Provinsi X
- Panjang jalan penghubung = 700,00 km
 pusat-pusat kegiatan dan
 pusat produksi (eksisting)
 kabupaten A
- Target panjang jalan = 800,00 km penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi hingga tahun 2019
- Realisasi konektivitas wilayah = 87,50% hingga tahun 2019

SPM Konektivitas Wilayah =
$$\frac{700,00km}{800.00km}$$
 = 87,50%

Artinya, konektivitas Kabupaten A Provinsi X baru mencapai 87,50% target standar pelayanan minimal penyediaan jalan.

d. Cara Mengukur

∨ Pengukuran Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota:

Pencapaian target SPM diukur dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Menentukan metode pengukuran

Pengukuran menggunakan alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer) atau visual (*Road Condition Index*/ RCI) yang dapat dikonversi kedalam satuan IRI.

Pengukuran menggunakan metode visual (RCI) disarankan digunakan dalam kondisi:

 Apabila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/ Romdas/ Roughometer) hasilnya sudah tidak feasible (nilai count/ BI > 400)

- Apabila situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)
- Apabila tidak mempunyai kendaraan dan alat survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)
- 2. Langkah 2: Melakukan survei lapangan sesuai dengan metode yang dipilih.
- 3. Langkah 3: Menentukan nilai IRI sesuai dengan metode yang dipilih.
 - a. Jika menggunakan alat, sebagai berikut:

Naasra

Jika menggunakan alat ini harus dikalibrasi bersama-sama dengan alat pengukur kerataan permukaan (Dipstick) pada segmen-segmen percobaan sepanjang ± 300 m untuk 1 (satu) kecepatan tertentu (misalnya ± 40 km/jam), dengan maksud untuk mencari hubungan antara nilai *count* (BI) yang dikeluarkan oleh alat Naasra dengan nilai IRI yang dikeluarkan oleh alat Dipstick (alat kerataan permukaan). Sehingga dari hasil kalibrasi tersebut akan diperoleh hubungan antara nilai *count* (BI) dan nilai IRI dalam bentuk persamaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Petunjuk Penggunaan Alat Naasra dan Petunjuk Penggunaan Alat Dipstick Z-250, dalam Dokumen Penyusunan SOP Survei dengan Alat Naasra, ATC Portable, dan Roughometer.

• Romdas

Sama halnya dengan Naasra, jika menggunakan alat Romdas harus dikalibrasi bersama-sama dengan alat pengukur kerataan permukaan (Dipstick) pada segmen-segmen percobaan sepanjang ± 300 m namun dengan variasi kecepatan dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi (sebagai contoh: kecepatan 15, 25, 30, 40, 50 km/ jam), dengan maksud untuk mencari hubungan antara nilai count (BI) yang dikeluarkan oleh alat Romdas dengan nilai IRI yang dikeluarkan oleh alat Dipstick (alat kerataan permukaan). Sehingga dari hasil kalibrasi tersebut akan diperoleh hubungan

antara nilai *count* (BI) dan nilai IRI dalam bentuk persamaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Petunjuk Penggunaan Alat Naasra dan Petunjuk Penggunaan Alat Dipstick Z-250, dalam Dokumen Penyusunan SOP Survei dengan Alat Naasra, ATC Portable, dan Roughometer.

Roughometer

Berbeda dengan Naasra dan Romdas, jika menggunakan alat Roughometer tidak perlu dikalibrasi bersama-sama dengan alat pengukur kerataan permukaan (Dipstick) karena alat ini dapat langsung mengeluarkan nilai IRI. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Petunjuk Penggunaan Alat ARRB Roughometer dan Petunjuk Penggunaan Alat Dipstick Z-250, dalam Dokumen Penyusunan SOP Survei dengan Alat Naasra, ATC Portable, dan Roughometer.

b. Jika menggunakan metode visual, sebagai berikut:

- Jika menggunakan metode visual (RCI), maka diperlukan minimal 3 (tiga) orang surveyor dengan tujuan untuk menghindari penilaian yang subyektif sehingga dapat diambil nilai rataratanya.
- •Metode visual ini dilakukan dengan cara menaksir berdasarkan persepsi masing-masing surveyor terhadap kondisi permukaan perkerasan yang diinterpretasikan dengan nilai RCI. Kemudian nilai RCI tersebut dirata-ratakan dari hasil interpretasi masing-masing surveyor. Sehingga akan diperoleh 1 (satu) nilai RCI untuk jalan di segmen-segmen tertentu. Selanjutnya, nilai RCI hasil rata-rata tersebut dikonversikan ke nilai IRI dengan menggunakan hubungan antara nilai RCI dan nilai IRI, dengan persamaan sebagai berikut:

 $RCI = 10 EXP (1)^{-0.094 IRI}$

sehingga

$$IRI = \frac{\ln{(\frac{RCI}{10})}}{-0.094}$$

Ket:

IRI : International Roughness Index RCI : Road Condition Index (0 - 10) EXP (1) : bilangan e = 2,718281828182

Tabel Korelasi antara Nilai RCI dan Jenis Permukaan Jalan

No.	Jenis Permukaan	Kondisi yang Ditinjau secara Visual	Nila i RCI
1.	Jalan tanah dengan drainase yang jelek, dan semua tipe permukaan yang tidak diperhatikan sama sekali	Tidak bisa dilalui	0-2
2.	Semua tipe perkerasan yang tidak diperhatikan sejak lama (4-5 tahun atau lebih)		2-3
3.	Pen. Mac. lama Latasbum lama, Tanah / Batu krikil gravel kondisi baik dan sedang	Rusak, bergelombang, banyak lubang	3-4
4.	Pen.Mac setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama	Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata	4-5
5.	Pen. Mac. baru, Latasbum baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun	Cukup, tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata	5-6
6	Lapis tipis lama dari Hotmix, Latasbum baru, Lasbutag baru	Baik	6-7
7.	Hot-mix setelah 2 tahun, Hotmix tipis diatas Pen.Mac	Sangat baik umumnya rata	7-8
8.	Hot-mix baru (Lataston, Laston) (Peningkatan dengan menggunakan lebih dari 1 lapis)		8-10

- 4. Langkah 4: Menghitung tingkat capaian target SPM melalui persentase antara realisasi panjang jalan (kondisi baik dan kondisi sedang) dengan panjang jalan provinsi/kabupaten/kota (eksisting) menggunakan formula sebagaimana yang ditampilkan pada huruf c (Target Capaian) tersebut di atas.
- ∨ Pengukuran Tersedianya Konektivitas Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota:
 - 1. Langkah 1: Mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota.

- 2. Langkah 2: Menghitung panjang jalan yang telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.
- 3. Langkah 3: Menghitung panjang jalan baru yang diperlukan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.
- 4. Langkah 4: Menghitung tingkat capaian target SPM melalui persentase antara realisasi dan target keseluruhan menggunakan formula sebagaimana yang ditampilkan pada huruf c (Target Capaian) tersebut di atas.

e. Upaya Pencapaian

∨ Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota:

Target standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dicapai melalui:

- Memiliki alat pengukur (Naasra/ Romdas/ Roughometer).
- Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat:
 - Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat Naasra/ Romdas/ Roughometer (untuk pengukuran menggunakan alat).
 - Menginterpretasikan kondisi jalan ke nilai RCI yang selanjutnya dikonversi ke nilai IRI (untuk pengukuran menggunakan metode visual).
- Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala pada jalan dan jembatan untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai IRI.
- ∨ Upaya Penyediaan Konektivitas Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota:
 - Setiap Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubungkan dengan jaringan jalan.
 - Percepatan penyelesaian Perda tentang RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

 Jika pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang dimaksud telah terhubungkan oleh moda transportasi lain, seperti: jalur kereta api, pelabuhan, bandara berarti telah memenuhi standar pelayanan minimum.

f. Referensi

- 1. Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40, UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
- 2. Pasal 112 dan 113, PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- 4. Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis;
- 5. Peta dan Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- 6. Rencana pengembangan wilayah dan Rencana pembangunan jalan dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah).

IV. Penyediaan Air Minum (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

- 1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- 3. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan

- sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- 4. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
- 5. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 6. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- 8. Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
- 9. Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
- 10. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau

instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plambing) di dalam bangunan tersebut.

b. Definisi Operasional

- 1. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanannya.
- 2. Definisi air minum terlindung/aman berdasarkan BPS adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
- 3. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
- 4. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

c. Ruang Lingkup

- 1. Sasaran Penyediaan Air Minum adalah meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman.
- 2. Indikator Penyediaan Air Minum adalah persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.

d. Target Capaian

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2019 adalah 81,77%.

e. Cara Mengukur

1) Rumus:

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$SPM \text{ cakupan pelayanan} = \frac{\sum_{akhir thn \ pencapaian \ SPM} Masyarakat \ terlayani}{\sum_{akhir thn \ pencapaian \ SPM} Proyeksi \ total \ masyarakat}$$

2) Pembilang:

Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM.

3) Penyebut

Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM.

4) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

5) Contoh Perhitungan

Kabupaten A merencanakan pada tahun akhir pencapaian SPM, jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 84.483 jiwa. Secara total proyeksi jumlah penduduk Kabupaten A pada akhir tahun pencapaian SPM sebanyak 120.690 jiwa.

Maka nilai SPM peningkatan cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM adalah:

$$\left[\frac{84.483\ jiwa}{120.690\ jiwa}\right] x 100\% = 70\%$$

f. Upaya Pencapaian

- 1. Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
- 2. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM
- 3. Pembagian tanggungjawab dalam rangka mencapai target SPM

g. Referensi

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang

- Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

V. Penyediaan Sanitasi (Kabupaten/Kota)

- 1. Penjelasan Umum
 - Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah.
 - 2. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman.

2. Penjelasan Teknis

1. Pengelolaan Air Limbah Permukiman

Tersedianya fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai

a. Pengertian

- 1) Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).
- 2) Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
- 3) Air Limbah Permukiman yang selanjutnya disebut air limbah adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah

- industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman.
- 4) Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, modular, dan kota.
- 5) Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
- 6) Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembagalembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedunggedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang
- 7) Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
- 8) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima

- lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
- 9) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

b. Definisi Operasional

- 1. Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
- 2. Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota.
- 3. Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
- 4. Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh

kabupaten/kota tersebut.

c. Ruang Lingkup

- Sasaran penyediaan sanitasi air limbah permukiman adalah meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman
- 2. Indikator Kualitas Layanan sistem air limbah antara lain :
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai;
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah terpusat.

d. Target capaian

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah pada tahun 2019 sebesar 60%.

e. Cara mengukur

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah - SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk.

Dirumuskan sbb:

SPM = Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK x 100% Jumlah total penduduk seluruh

1) Pembilang

Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat

2) Penyebut

Jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM

3) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

4) Contoh perhitungan

Jika di kota A pada tahun akhir pencapaian SPM jumlah masyarakat yang terlayani tangki septic = 50.000 KK,

yang terlayani MCK Komunal = 10.000 KK, yang terlayani sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat = 10.000 KK. Jika asumsi 1 KK adalah 5 jiwa maka pelayanan air limbah yang memadai adalah 70.000 x 5 = 350.000 jiwa.

Jika total jumlah penduduk kota A pada akhir tahun pencapaian SPM adalah sebanyak 500.000 jiwa

Maka nilai SPM air limbah kota A pada akhir tahun pencapaian SPM adalah :

$$SPM = \frac{350.000}{500.000} \times 100\%$$
$$SPM = 70\%$$

Artinya kota A tersebut telah memenuhi SPM pada akhir tahun pencapaiannya karena perhitungan SPM melebihi SPM target.

f. Upaya pencapaian

- 1. Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
- Sosialisasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
- 3. Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.

g. Referensi

- 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau

- Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman

2. Pengelolaan Sampah

- 1. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
 - a. Pengertian
 - 1) Pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
 - 2) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
 - 3) Sumber sampah adalah asal timbulan sampah
 - 4) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - 5) Pengelolaan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
 - 6) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

b. Definisi Operasional

Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya tersisa residu sampah.

c. Cara Perhitungan

SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan.

$$SPM = (A/B) \times 100\%$$

Dimana:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa)

B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = C \times D$$

Dimana:

C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit)

D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit)

Contoh Perhitungan:

Jika kota A pada akhir tahun SPM memiliki fasilitas pengurangan sampah 3R sebanyak 13 unit. Dimana setiap unit fasilitas pengurangan sampah mampu melayani penduduk sebanyak 1.000 jiwa, maka jumlah penduduk yang dilayani melalui fasilitas pengurangan sampah adalah

 $= 13 \text{ unit } \times 1.000 \text{ jiwa/unit} = 13.000 \text{ jiwa}$

Jika jumlah penduduk kota A sampai akhir tahun pencapaian SPM adalah sebanyak 60.000 jiwa.

Maka SPM pengurangan sampah pada akhir tahun pencapaian adalah

 $= (13.000 \text{ jiwa}/60.000 \text{ jiwa}) \times 100\% = 21,67 \%$

Artinya kota A tersebut telah memenuhi SPM pada akhir tahun pencapaiannya karena perhitungan SPM melebihi SPM target.

d. Sumber Data

- Data primer terkait jumlah fasilitas pengurangan volume sampah perkotaan (3R) yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi pengelolaan sampah.
- Data primer terkait jumlah penduduk yang dilayani oleh masing-masing fasilitas pengurangan volume sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh masing-masing pengelola

fasilitas pengurangan volume sampah dan dinas yang membidangi pengelolaan sampah

 Data sekunder, maksimal 2 (dua) tahun terakhir, bersumber dari dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan (RIS Persampahan)/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), hasil studi bidang persampahan yang diakui oleh pemerintah, dan/atau BPS Daerah.

e. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006
 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
 Sistem Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013
 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan
 Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga

f. Target

Nilai SPM Pengurangan Sampah di perkotaan adalah 20% untuk Tahun 2019.

g. Langkah kegiatan

- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pengurangan volume sampah dalam suatu pengelolaan sampah yang terpadu.
- Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui pemberdayaan oleh fasilitator.

- Memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengurangan volume sampah berbasis masyarakat.
- Mengidentifikasi lokasi fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota.
- Menyiapkan rencana kelembagaan, teknis, operasional dan finansial untuk fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan.
- Membangun fasilitas pengurangan volume sampah di perkotaan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

h. SDM

- KSM yang melaksanakan kegiatan 3R berbasis masyarakat.
- SDM Dinas yang membidangi pengelolaan sampah dan melaksanakan kegiatan 3R berbasis institusi.

2. Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan

a. Pengertian

Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber timbulan sampah dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

b. Definisi Operasional

Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah (rumah, perkantoran, pasar, dll), TPS 3R, TPS menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, dimana untuk jenis sampah

mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut dari lingkungan permukiman.

c. Cara Perhitungan

SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan persampahan.

$$SPM = (A / B) \times 100\%$$

Dimana:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)

B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = (C \times 1.000 \times D \times E) /$$

Dimana:

C = kapasitas kendaraan pengangkut (m³/unit)

D = jumlah ritasi (kali/hari)

E = jumlah truk (unit)

F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari)

Contoh Perhitungan:

Jika kota A telah melakukan pengangkutan sampah di beberapa wilayah kota. Pada akhir tahun pencapaian SPM, memiliki kendaraan pengangkut berupa 10 unit motor sampah dengan kapasitas 1 m³; 5 unit dump truck dengan kapasitas 6 m³; 2 unit armroll dengan kapasitas 8 m³, masing-masing dengan jumlah ritasi 2 kali/hari. Berdasarkan SNI, didapat jumlah timbulan sampah 2,65 liter/jiwa/hari.

A = ((10 unit x 1 m 3 /unit x 2 kali/hari) + (5 unit x 6 m 3 /unit x 2 kali/hari) + (2 unit x 8 m 3 /unit x 2 kali/hari)) x 1.000 / 2,65 liter/jiwa/hari

= 42.264 jiwa

Total penduduk daerah pelayanan sampah perkotaan sampai akhir tahun pencapaian adalah 60.000 jiwa.

Maka SPM pengangkutan pada akhir tahun pencapaian adalah = (42.264 jiwa/60.000 jiwa) x 100% = 70,44 %

Artinya kota A tersebut telah memenuhi SPM pada akhir tahun pencapaiannya karena perhitungan SPM melebihi SPM target.

d. Sumber Data

- Data primer timbulan sampah berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.
- Data primer terkait pengangkutan sampah daerah pelayanan sampah perkotaan (jumlah dan kapasitas kendaraan pengangkut, ritasi pengangkutan termasuk pengangkutan yang dilakukan oleh pihak swasta) yang dikeluarkan dinas yang membidangi pengelolaan sampah.
- Data sekunder, maksimal 2 (dua) tahun terakhir, bersumber dari dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan (RIS Persampahan)/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), hasil studi bidang persampahan yang diakui oleh pemerintah, dan/atau BPS Daerah.

e. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006
 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
 Sistem Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013
 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
 Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga
- SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan

f. Target

Nilai SPM Pengangkutan Sampah adalah 70% untuk Tahun 2019.

g. Langkah kegiatan

- Menentukan daerah pelayanan persampahan perkotaan
- Menentukan rencana tahapan pelayanan persampahan perkotaan
- Menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan rencana pelayanan
- Melakukan pengangkutan sampah minimal 2 kali seminggu
- Melakukan pengangkutan sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali
- Melakukan pengangkutan residu dari TPS 3R secara berkala

- Melakukan pengangkutan dengan aman, sampah tidak boleh berceceran ke jalan saat pengangkutan (gunakan jaring, mengangkut sampah sesuai kapasitas kendaraan)
- Melakukan pembersihan dan perawatan berkala untuk kendaraan untuk mencegah karat yang diakibatkan lindi dari sampah yang menempel di kendaraan

h. SDM

SDM dinas yang membidangi pengelolaan sampah.

3. Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

a. Pengertian

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sistem pengoperasian TPA meliputi pengoperasian TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas.

Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Metode Lahan Urug Saniter (sanitary landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

b. Definisi Operasional

TPA dioperasikan minimal secara controlled landfill untuk kota kecil/sedang, dan minimal secara sanitary landfill untuk kota besar/metropolitan.

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkungan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pemrosesan akhir sampah. Hal ini dinyatakan dalam frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

c. Cara Perhitungan

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang

Open dumping = 0.0

Controlled landfill = 1,0

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan

Open dumping = 0.0

Controlled landfill = 0.5

Sanitary landfill = 1,0

Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi

Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0.0

Efluen memenuhi baku mutu = 1,0

Koefisien Penanganan Gas

Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0

Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5

Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0

 $SPM = (A \times 40\%) + (B \times 40\%) + (C \times 20\%)$

Dimana:

A = Koefisien pengoperasian TPA

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi

C = Koefisien penanganan gas

Contoh Perhitungan:

Jika kota A adalah sebuah kota besar yang telah mengoperasikan TPA dengan melakukan penutupan sel sampah setiap 7 hari sekali (controll landfil). Setelah melalui pemeriksaan laboratorium, kualitas efluen lindi memenuhi baku mutu. Gas dikumpulkan melalui pipa pengumpul dan dilepaskan ke udara.

 $SPM = (0.5 \times 40\%) + (1.0 \times 40\%) + (0.5 \times 20\%) = 70\%$

Maka nilai SPM Pengoperasian TPA adalah 70%.

Artinya kota A tersebut telah memenuhi SPM pada akhir tahun pencapaiannya karena perhitungan SPM sama dengan SPM target.

d. Sumber Data

- Data primer terkait pengoperasian TPA (frekuensi penutupan dan pemadatan sel sampah, hasil pemeriksaan laboratorium efluen lindi, sistem perpipaan penangkapan dan pemanfaatan gas) yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi pengoperasian TPA.
- Data sekunder, maksimal 2 (dua) tahun terakhir, bersumber dari dokumen Rencana Induk Sistem Persampahan (RIS Persampahan)/Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), hasil studi bidang persampahan yang diakui oleh pemerintah, dan/atau BPS Daerah.

e. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah terkait Baku Mutu Efluen dan/atau Peruntukan Badan Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
 Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006
 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
 Sistem Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013
 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
 Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

f. Target

Nilai SPM Pengoperasian TPA adalah 70% untuk Tahun 2019.

g. Langkah kegiatan

- Mengoperasikan TPA sesuai dengan SOP, terutama dalam hal:
 - 1. Menghitung volume dan/atau berat sampah yang masuk ke TPA
 - 2. Membuat perencanaan zonasi penimbunan sampah (sel harian/sel mingguan/sel bulanan)

- 3. Memeriksa kualitas efluen lindi ke laboratorium yang tersertifikasi secara berkala (minimal 1 bulan sekali) dan/atau pada saat perubahan cuaca yang signifikan
- 4. Penangkapan dan pemanfaatan gas
- Penyempurnaan terhadap SOP apabila diperlukan

h. SDM

SDM institusi yang membidangi pengoperasian TPA.

2. Drainase

- a. Pengertian
 - 1) Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
 - 2) Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
 - 3) Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.
 - 4) Sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
 - 5) Prasarana dan sarana drainase perkotaan yang dimaksud antara lain selokan/saluran drainase, gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, sumur resapan, pompa, pintu air, dan kolam/waduk.

6) Yang disebut genangan adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam.

b. Definisi operasional

- 1) Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti perkembangan bersifat perkotaannya, maupun non struktural terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.
- 2) Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebih palung sungai.
- 3) Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat.

c. Ruang Lingkup

- 1) Sasaran penyediaan sistem drainase adalah meningkatnya kualitas layanan drainase kawasan perkotaan.
- 2) Indikator penyediaan sistem drainase adalah:
 - a. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota.
 - b. Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani.

d. Target Pencapaian

SPM sistem jaringan drainase skala kota sehingga persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam, lebih dari 2 kali setahun) yang tertangani adalah 50% pada tahun 2019.

e. Cara Mengukur

1) Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

SPM pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun SPM terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.

Keterangan:

Pembilang (A) : jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase

Penyebut (B) : jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota

Ukuran/konstanta : persen (%)

Pelaksanaan pengukuran

Diukur melalui hasil survey atau kuesioner yang dapat dilakukan oleh BPS daerah masing-masing, atau oleh pendataan/survey yang dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya menangani Bidang Drainase dengan cara survey langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer.

2) Pengurangan Luas Genangan

SPM ini adalah persentase luasan yang masih tergenang di suatu Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten dimaksud.

Keterangan:

Pembilang (A): jumlah luasan daerah yang masih tergenang (2 jam setelah hujan masih terendam > 30 cm).

Penyebut (B) : luas daerah rawan genangan

Ukuran/konstanta : persen (%)

Pelaksanaan Pengukuran:

Diukur melalui hasil survey atau kuesioner untuk mendapatkan data primer yang dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya menangani bidang drainase atau dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh BPS Daerah langsung di lapangan. Peta juga dapat diperoleh melalui hasil studi Master Plan/Outline Plan sistem drainase ataupun reviewnya, yang didalamnya memuat peta daerah genangan.

f. Upaya Pencapaian

Memperkuat kegiatan struktural dan non-struktural, dengan :

- 1) Mendorong pelaksanaan pembangunan yang berbasis kinerja dengan mengutamakan *outcome*.
- 2) Memperkuat pembinaan teknis kepada institusi pengelola drainase dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- 3) Memperkuat kegiatan pembinaan teknis perencanaan sistem drainase.

g. Contoh Perhitungan

a) Ketersediaan Pelayanan Jaringan Drainase

Di Kabupaten A, pada akhir tahun pencapaian SPM dicatat jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan prasarana drainase adalah 200.000 jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat di Kabupaten A tersebut sebanyak 350.000 jiwa. Maka nilai SPM ketersediaan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota adalah:

Tingkat pelayanan jaringan drainase =
$$\frac{200.000}{350.000} \times 100\%$$

= 57.1%

Jika target pelayanan jaringan drainase pada akhir tahun SPM sebesar 50%, maka Kabupaten A telah memenuhi SPM.

b) Pengurangan Luas Genangan

Di Kabupaten B, pada awal sebelum penilaian SPM telah dicatat melalui survei dari Dinas PU Kota bahwa kota tersebut mempunyai daaerah genangan sebesar 100 ha, sedangkan luas kota tersebut 10.000 ha. Setelah ditangani, pada akhir tahun pencapaian SPM ternyata yang masih tergenang masih 70 ha.

Pencapaian ideal = 100 %

Pengurangan luas genangan =
$$\frac{(100-70) ha}{100 ha} \times 100\%$$
$$= 30 \%$$

Jika target pengurangan luas genangan pada akhir tahun SPM sebesar 50%, maka Kabupaten B belum memenuhi SPM.

h. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

VI. Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kabupaten/kota)

a. Pengertian

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- Pelestarian/pemugaran.

b. Definisi Operasional

Jumlah IMB yang diterbitkan adalah kumulatif penerbitan IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Perda Bangunan Gedung guna meningkatkan tertib pembangunan bangunan gedung.

c. Ruang Lingkup

- 1. Sasaran Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung.
- 2. Indikator Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah jumlah IMB yang diterbitkan.

d. Target Capaian

Target pencapaian SPM jumlah IMB yang diterbitkan adalah 60% pada tahun 2019.

e. Cara Mengukur

Pelaksanaan penerbitan IMB di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG) kabupaten/kota yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG). Rencana capaian jumlah IMB yang diterbitkan adalah 60% dari jumlah bangunan gedung di kabupaten/kota.

Rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ IMB yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ bangunan gedung di kabupaten/kota}} X 100\%$$

f. Upaya Pencapaian

Peningkatan jumlah IMB yang diterbitkan dilakukan melalui:

- Penyusunan Perda Bangunan Gedung sebagai payung hukum penerbitan IMB di kabupaten/kota yang memperhatikan substansi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas berkenaan dengan pemberian rekomendasi dan penerbitan IMB melalui sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis.
- Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan IMB guna mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan).

- Pelaksanaan penerbitan IMB mengacu ketentuan Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dilandasi prinsip-prinsip pelayanan prima:
 - Prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan berasarkan tingkat kompleksitas permasalahan rencana teknis.
 - Waktu proses penerbitan yang singkat berdasarkan penggolongan sesuai dengan tingkat kompleksitas prosedur penerbitan IMB.
 - Transparansi dalam pelayanan dan informasi termasuk penghitungan/penetapan besarnya retribusi IMB yang dilakukan secara objektif, proporsional dan terbua; dan
 - Keterjangkauan yaitu besarnya retribusi IMB sesuai dengan lingkup dan jenis bangunan gedung serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.
- Pemberian kemudahan akses bagi masyarakat dalam rangka pengurusan IMB melalui penyediaan lokasi pelayanan pengurusan dan pembayaran retribui IMB yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Pemberian kemudahan bagi aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memproses penerbitan IMB yaitu dengan menggunakan software pendataan bangunan gedung.

g. Referensi

- 1. Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 3. Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

VII. Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

- 1. Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 2. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 3. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 4. Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebut.

b. Definisi Operasional

Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni an/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

c. Ruang Lingkup

- 1. Sasaran Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan adalah berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan.
- 2. Indikator Penanganan Kumuh Perkotaan adalah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

d. Target Capaian

SPM tingkat pelayanan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 10% pada tahun 2019.

e. Cara Mengukur

1) Rumus

SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota A hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di kota A.

$$SPM \ tingkat \ pelayanan = \frac{\displaystyle\sum^{akhir \ thn \ pencapaian \ SPM}}{\displaystyle\sum^{hotaA} Total \ Permukiman \ Kumuh \ yang \ Telah \ Ditetapkan \ di \ Kota \ A}$$

2) Pembilang

Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota A sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4) Ukuran Konstanta

Persen (%).

5) Contoh Perhitungan

Kota A telah mengurangi luasan permukiman kumuh sebanyak 50 Ha sejak diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga tahun 2019, sedangkan total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah seluas 500 Ha. Maka, nilai SPM pelayanan penanganan permukiman kumuh perkotaan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$\frac{50 \, Ha}{500 \, Ha} \times 100\% = 10\%$$

f. Upaya Pencapaian

Peningkatan kualitas permukiman dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, martabat yang layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dilakukan berdasarkan identifikasi melalui penentuan kriteria kumuh dan pembobotan kekumuhan dengan penanganan meliputi:

- 1. perbaikan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial, dan dilaksanakan secara bertahap
- pemugaran, yaitu dengan melakukan perbaikan dan/atau pembangunan kembali rumah dan lingkungan sekitar menjadi keadaan asli sebelumnya
- 3. peremajaan, yaitu dengan melakukan perombakan mendasar dan bersifat menyeluruh dalam rangka mewujudkan kondisi rumah dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik
- 4. pemukiman kembali, yaitu dengan memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni ke lokasi perumahan lain yang layak huni,
- 5. pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu dengan mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman agar berfungsi sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya melalui penataan kembali permukiman kumuh, yang dilakukan melalui tahapan pelaksanaan antara lain:

- 1. Pemilihan dan penetapan lokasi
- 2. Sosialisasi
- 3. Rembug warga
- 4. Survey
- 5. Perencanaan
- 6. Matriks Program
- 7. Peta Rencana DED
- 8. Pelaksanaan fisik

g. Referensi

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

VIII. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)

a. Pengertian

- 1) Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi tentang jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.
- 2) Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKI adalah sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, dan peningkatan transparansi.

b. Ruang Lingkup

1. Sasaran Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi adalah meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi di wilayah provinsi.

- 2. Indikator Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi adalah persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada SIPJAKI.
- 3. Informasi-informasi jasa konstruksi yang dipublikasikan di tingkat Provinsi meliputi:
 - a. Potensi pasar jasa konstruksi diwilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya;
 - b. Paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang ter-*update* secara berkala; dan
 - c. Profil tim pembina jasa konstruksi Provinsi.

c. Target Capaian

Secara nasional, target pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada tahun 2019 adalah 100%.

d. Cara Menghitung Nilai Pencapaian SPM

1) Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi secara Nasional

Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi secara nasional diketahui dengan menghitung ratarata Nilai Layanan Dasar SIPJAKI tingkat Provinsi.

2) Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Provinsi

Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Provinsi diperoleh dari kumulatif pembobotan terhadap 3 (tiga) jenis informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada SIPJAKI.

Berdasarkan sifat strategis informasi, masing-masing jenis informasi tingkat provinsi memiliki bobot sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi	Bobot
		(%)
1	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi	40
	untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari	

	dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan									
	lainnya									
2	Paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan									
	sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa									
	konstruksi yang terupdate secara berkala									
3	Profil tim pembina jasa konstruksi Provinsi	30								

Nilai layanan dasar provinsi untuk indikator Tersedianya 3 (tiga) Jenis Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada SIPJAKI adalah total dari jumlah prosentase bobot ketiga jenis informasi tersebut. Nilai bobot hanya diberikan pada layanan informasi yang ter-*update*.

Contoh:

Pada saat ini, provinsi A yang dievaluasi pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi	Ada dan	Bobot	Nilai
		ter-	(%)	(%)
		update/		
		Tidak ada		
1	Potensi pasar jasa konstruksi di	Ada &	40	0
	wilayah provinsi untuk tahun	tidak ter-		
	berjalan yang dapat bersumber	update		
	dari dana APBD, APBN, dan	_		
	sumber pendanaan lainnya			
2	Paket pekerjaan jasa konstruksi	Tidak ada	30	0
	yang sudah dan sedang			
	dilaksanakan oleh badan usaha			
	jasa konstruksi yang terupdate			
	secara berkala			
3	Profil tim pembina jasa	Ada & ter-	30	30
	konstruksi Provinsi	update		

Maka Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Provinsi A pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah 30%.

e. Cara Mengukur

Untuk menyediakan 3 layanan informasi jasa konstruksi, Pemerintah Provinsi dapat memanfaatkan aplikasi SIPJAKI yang dapat diakses di www.jasakonstruksi.net. Fasilitas SIPJAKI mengintegrasikan data layanan

informasi jasa konstruksi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengukuran pencapaian SPM Nasional dan nilai layanan dasar Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan alur proses sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi melakukan input data ke dalam www.jasakonstruksi.net yang dikelola oleh Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Pusat melakukan penghitungan dan rekapitulasi data yang telah di input Pemerintah Provinsi

f. Upaya Pencapaian

- 1) Sumber Daya Manusia dan Sarana
 - a) Penanggungjawab Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi
 Penanggung jawab dan dan penanggung gugat pengembangan sistem informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi adalah kepala dinas atau kepala instansi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi.
 - b) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi
 - 1) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi adalah orang yang bertugas melakukan input dan mengelola data SIPJAKI ditingkat Provinsi.
 - 2) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi ditunjuk dan ditetapkan dengan SK Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Asisten II Sekretariat Daerah.
 - 3) Administrator SIPJAKI berjumlah 2 (dua) orang dari instansi yang termasuk didalam Tim Pembina Jasa Konstruksi.
 - 4) Pemerintah Pusat memberikan *user* dan *password* kepada administrator yang telah ditetapkan dengan SK Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Asisten II Sekretariat Daerah agar dapat mengelola aplikasi SIPJAKI (<u>www.jasakonstruksi.net</u>).

c) Sarana

Sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi adalah perangkat komputer dan jaringan internet.

2) Koordinasi, Input dan Pemutakhiran Data

- a) Penanggungjawab SIPJAKI Tingkat Provinsi mengkoordinasikan dan mengumpulkan data terkait 3 (tiga) jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait.
- b) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala.
- c) Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI.

g. Referensi

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah atara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

IX. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

- 1) Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi tentang jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.
- 2) Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKI adalah sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, dan peningkatan transparansi.

3) Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan untuk melakukan usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh instansi penerbit IUJK dalam bentuk kartu.

b. Ruang Lingkup

- 1. Sasaran Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota adalah meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota.
- 2. Indikator Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota adalah persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada SIPJAKI.
- 3. Informasi-informasi jasa konstruksi yang dipublikasikan di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Data izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala;
 - b. Data badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala;
 - c. Data tenaga kerja konstruksi yang ter-update secara berkala;
 - d. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya;
 - e. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang ter-*update* secara berkala;
 - f. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang ter-*update* setiap 6 (enam) bulan;
 - g. Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota.

c. Target Capaian

Secara nasional, target pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2019 adalah 60%.

d. Cara Menghitung Nilai Pencapaian SPM

- 1) Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota secara Nasional Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota secara nasional diketahui dengan menghitung rata-rata Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota Nilai Layanan Dasar Sipjaki Tingkat Kabupaten/Kota diperoleh dari kumulatif pembobotan terhadap 7 (tujuh) jenis informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada SIPJAKI.

Berdasarkan sifat strategis informasi, masing-masing jenis informasi tingkat Kabupaten/Kota memiliki bobot sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi									
1	Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala									
2	Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala									
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	10								
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya									
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	10								
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan.	15								
7	Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota	10								

Nilai Layanan Dasar Sipjaki Tingkat Kabupaten/Kota adalah total dari jumlah prosentase bobot ketujuh jenis informasi tersebut. Nilai bobot hanya diberikan pada layanan informasi yang ter-update.

Contoh:

Pada saat ini, Kabupaten A yang dievaluasi pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi	Ada &	Bobot	Nila
		Terupdat	(%)	i
		e /		(%)
		Tidak		
		ada		
1	Izin usaha jasa konstruksi yang	Ada &	35	35
	terupdate secara berkala	terupdate		
2	Data Badan usaha jasa konstruksi	Ada &	10	10
	yang terupdate secara berkala	terupdate		
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi	Ada &	10	10
	yang terupdate secara berkala	terupdate		
4	Potensi pasar jasa konstruksi di	Tidak ada	10	0
	wilayah kabupaten/kota untuk tahun			
	berjalan yang dapat bersumber dari			
	dana APBD, APBN, dan sumber			
	pendanaan lainnya			
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan	Ada &	10	10
	yang terupdate secara berkala	terupdate		
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga	Ada &	15	0
	satuan material konstruksi yang	tidak		
	terupdate setiap 6 (enam) bulan	terupdate		
7	Profil tim pembina jasa konstruksi di	Ada &	10	10
	kabupaten/kota	terupdate		

Maka nilai Layanan Dasar SIPJAKI Kabupaten A pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah 35% + 10% + 10% + 10% + 10% = 75%

e. Cara Mengukur

Untuk menyediakan 7 layanan informasi jasa konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan aplikasi SIPJAKI yang dapat diakses di www.jasakonstruksi.net. Fasilitas SIPJAKI mengintegrasikan data layanan informasi jasa konstruksi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengukuran pencapaian SPM Nasional dan nilai layanan dasar Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan alur proses sebagai berikut :

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan input data ke dalam www.jasakonstruksi.net yang dikelola oleh Pemerintah Pusat
- d. Pemerintah Pusat melakukan penghitungan dan rekapitulasi data yang telah di input Pemerintah Kabupaten/Kota .

f. Upaya Pencapaian

- 1) Sumber Daya Manusia dan Sarana
 - a) Penanggungjawab Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota
 Penanggung jawab dan dan penanggung gugat pengembangan sistem informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota adalah kepala dinas atau kepala instansi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi.
 - b) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota adalah orang yang bertugas melakukan input dan mengelola data SIPJAKI ditingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Administrator ditunjuk dan ditetapkan dengan SK Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Asisten II Sekretariat Daerah.
 - 3) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari instansi penerbit Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - b. 1 (satu) orang dari Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi/Administrasi Pembangunan atau instansi teknis ke-PU-an.
 - 4) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota yang berasal dari instansi penerbit Izin Usaha Jasa Konstruksi bertugas melakukan input dan pemutakhiran data Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

- 5) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota yang berasal dari Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi/Administrasi Pembangunan atau instansi teknis ke-PU-an bertugas melakukan input dan pemutakhiran data potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan, daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi, serta profil tim pembina jasa konstruksi.
- 6) Pemerintah Pusat memberikan *user* dan *password* kepada administrator yang telah ditetapkan dengan SK Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Asisten II Sekretariat Daerah agar dapat mengelola aplikasi SIPJAKI (<u>www.jasakonstruksi.net</u>).
- c) Data Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi Aplikasi SIPJAKI memanfaatkan data badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang telah tersedia pada sistem informasi yang dikelola Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk ditampilkan pada website SIPJAKI, sehingga menjadi bagian dari layanan informasi Kabupaten/Kota.

d) Sarana

Sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota adalah perangkat komputer dan jaringan internet.

2) Koordinasi, Input dan Pemutakhiran Data

- a) Penanggungjawab SIPJAKI tingkat Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan mengumpulkan data-data terkait 7 (tujuh) jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait.
- b) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala.
- c) Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI.

g. Referensi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah atara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

X. Izin Usaha Jasa Konstruksi (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

- Badan usaha jasa konstruksi nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- 2. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha sesuai dengan wilayah kabupaten/kota.
- 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- 4. Waktu Penerbitan IUJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya IUJK terhitung mulai dari tanggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannya IUJK setelah dikurangi dengan hari libur dalam kurun waktu tersebut.
- 5. Persyaratan Lengkap adalah kondisi dimana Badan Usaha telah dinyatakan instansi penerbit IUJK memenuhi persyaratan administrasi, tenaga teknis, dan aspek-aspek yuridis, serta memiliki kantor yang sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Ruang Lingkup

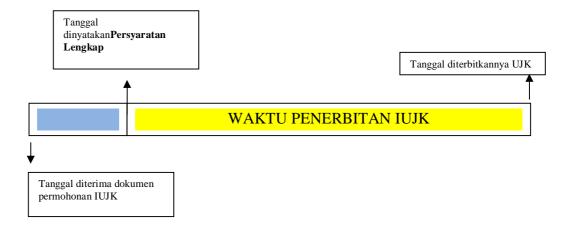
1. Sasaran Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi.

2. Indikator SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap.

c. Target Capaian

Secara nasional, target pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi pada tahun 2019 adalah 100 %.

- a. Cara Menghitung Nilai Pencapaian SPM
 - 1) Pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi secara Nasional Pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota secara nasional diketahui dengan menghitung rata-rata nilai Layanan Dasar IUJK Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Nilai Layanan Dasar IUJK Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) Pengertian Waktu Penerbitan IUJK



Waktu = Tanggal diterbitkannya IUJK - tanggal
Penerbitan dinyatakan persyaratan lengkap - jumlah hari
IUJK libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam
kurun waktu penerbitan IUJK

Target waktu penerbitan IUJK adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Nilai Layanan Dasar IUJK Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

 $NIlai \ Layanan \ Dasar \ IUJK \ Tingkat \ Kabupaten/Kota \\ = \frac{\sum Permohonan \ IUJK \ yang \ diterbitkan \ paling \ lama \ 10 \ harikerja \ setelah \ Persyaratan \ Lengkap}{\sum Seluruh \ permohonan \ IUJK \ yang \ pesyaratannya \ dinyatakan \ lengkap}$

IUJK harus tetap diproses dengan skala prioritas yang sama, meskipun waktu penerbitan IUJK sudah melewati batas 10 (sepuluh) hari kerja. Contoh:

Jumlah permohonan IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap pada tahun 2019 dari Kabupaten A adalah sebanyak 100 permohonan. Dari 100 permohonan tersebut, diketahui ternyata jumlah IUJK yang diterbitkan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja adalah sebanyak 90 permohonan. Maka pencapaian Nilai Layanan Dasar IUJK Kabupaten A pada tahun 2019 adalah :

Nilai Layanan Dasar IUJK Kabupaten A =
$$\frac{90}{100}$$
x100% = 90 %

b. Cara Mengukur

- 1) Instansi penerbit IUJK melakukan pencatatan kinerja pelayanan dengan menggunakan Lembar Kendali SPM IUJK.
- 2) Pengisian Lembar Kendali SPM IUJK dilakukan pada setiap permohonan IUJK.
- 3) Instansi penerbit IUJK melakukan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK atau 4 (empat) bulan sekali dihitung mulai bulan Januari.
- 4) Rekapitulasi kinerja pelayanan IUJK dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan melampirkan salinan Lembar Kendali SPM IUJK.
- 5) Format Lembar Kendali SPM IUJK dan Lembar Rekapitulasi Kinerja Pelayanan IUJK sebagaimana tercantum di bawah ini.

LEMBAR KENDALI SPM IUJK

JANGKA WAKTU PENERBITAN IUJK (HARI)				(7) = (6) - (5)	(5) - (6) = (5)	(5) - (9) = ((5) - (5)	(5) - (6) - (5)	(5) - (6) - (1)	(5) - (5)	(5) - (5)	(5) - (6) - (1)	(5) - (6) - (1)	(5) - (6) - (1)	
		PETUGAS	PERIZINAN		6	5	5	12)	F)						
TANGGAL PENYERAHAN IUJK	PARAF				(a)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>ā</u>	<u> </u>	<u>ā</u>		
INGGAL PE		15 <u>r</u>	<u> </u>												
TA	NOMOR	71, 177	4001												
TEMENUHI	PARAF	PETUGAS	PERIZINAN	_											
BU DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN	PARAF	NO CO COMA	remonor	(5)											
BU DII		161	<u>. </u>												
ERIMA	PARAF	PETUGAS	PERIZINAN			_									
DOKUMEN DITERIMA	PARAF	MOD COM	NO DO MA	(_									
100		TGL	<u> </u>												
	JENIS	PERMOHONAN		(3)											
	BUJK PEMOHON			(2)											
	NO.			(1)	г	2		, m	w 4	ω 4 ν	ω 4 w σ	w 4 w % r-	ω 4 m m r ∞	η 4 N P ∞ Φ	w 4 w w 1 w w 0

Penanggungjawab SPM Tingkat Dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja Kabupaten/Kota Penerbitan Kurang atau Sama Setelah Persyaratan Lengkap Jumlah IUJK dengan Waktu Diketahui oleh, (Catur Wulan:..... Kepala Instansi Penerbit IUJK (Tempat),.....(Tanggal) Jumlah Permohonan IUJKN yang Telah Memenuhi Persyaratan

Lampiran: Lembar Kendali SPM IUJK Catur Wulan

c. Upaya Pencapaian

1) Penanggungjawab Pelaksanaan SPM IUJK

Penanggung jawab pelaksanaan SPM IUJK adalah kepala dinas atau kepala instansi yangmemiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi.

2) Pelaksana Layanan IUJK

Pelaksana layanan IUJK adalah instansi yang telah diberikan kewenangan oleh Bupati atau Walikota untuk memberikan IUJK.

3) Verifikasi dan Validasi Data

Untuk dapat menyatakan Badan Usaha telah memenuhi persyaratan, instansi pelaksana layanan IUJK melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan, memeriksa pemenuhan aspekaspek yuridis, memeriksa pemenuhan persyaratan tenaga teknis, memeriksa kesesuaian lokasi kantor dengan surat keterangan domisili, serta bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan, terutama untuk badan usaha baru.

4) Koordinasi

- a) Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) Pemerintah Provinsi melakukan monitoring pelaksanaan SPM IUJK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan mendorong pelaporan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK untuk setiap kabupaten/kota di wilayahnya;
- d) Penanggungjawab Pelaksanaan SPM IUJK di tingkat kabupaten/kota melakukan pengawasan dan mendorong terlaksananya SPM IUJK oleh instansi pelaksana IUJK.

d. Referensi

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah an antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
- 4. Peraturan Daerah masing-masing kabupaten/kota tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

XI. Informasi Penataan Ruang (Provinsi/Kabupaten/Kota)

a. Informasi Berupa Peta Analog

1) Pengertian

Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan peta analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

2) Definisi Operasional

a) Bentuk : peta dalam bentuk cetakan (hardcopy)

b) Lokasi : di setiap kantor instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan/desa sesuai dengan cakupan wilayah perencanaan rencana tata ruang.

c) Deskripsi : - peta analog dapat terdiri dari peta RTRW
Provinsi/Kabupaten/kota dan peta Rencana Rinci
Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- peta analog harus memuat informasi rencana

struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1: 250.000 (RTRW Provinsi) 1: 50.000 (RTRW Kabupaten), 1: 25.000 (RTRW Kota), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.

b. Informasi Berupa Peta Digital

1) Pengertian

Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang di digitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya

2) Definisi Operasional

a) Bentuk : peta digital (softcopy)

b) Lokasi : di setiap kantor instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan/desa sesuai dengan cakupan

wilayah perencanaan rencana tata ruang.

c) Deskripsi

- : peta digital dapat terdiri atas peta RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota dan peta rencana rinci RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota, yang dibuat dalam format Arc-info/Map-info atau yang minimal dibuat dalam format .jpg/.png.
 - peta digital harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 250.000 (RTRW Provinsi), 1
 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1 : 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda.

c. Ruang Lingkup

- 1. Indikator Informasi Penataan Ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
- 2. Sasaran Informasi Penataan Ruang adalah meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang.

d. Target Capaian

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang ditingkat provinsi adalah 100% pada Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang provinsi, khususnya melalui peta RTRW provinsi dan/atau rencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanya dapat diakses dengan mudah.

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang ditingkat kabupaten/kota adalah 100%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang kabupaten/kota, khususnya melalui peta RTRW kabupaten/kota dan/atau rencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanya dapat diakses dengan mudah.

Cara perhitungan pencapaian target:

$$\frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlahpeta analog/digital}}{\sum_{\text{seluruhkabupaten/kota/kecamatan/kelurahan}} \text{SPM InformasiPeta Analog}} = \frac{\sum_{\text{seluruhkabupaten/kota/kecamatan/kelurahan}} \text{Jumlahpeta}}{\sum_{\text{seluruhkabupaten/kota/kecamatan/kelurahan}} \text{SPM InformasiPeta Analog}}$$

Keterangan:

- Pembilang : Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.

- Penyebut : Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog/digital yang seharusnya tersedia di kabupaten/kota, kecamatan, atau kelurahan/desa.

- Ukuran Konstanta: Persen (%).

e. Cara Mengukur (Monitoring dan Evaluasi)

Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian SPM pada daerahnya adalah melalui survey. Survey tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan SPM.

f. Upaya Pencapaian

Langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai target penyediaan SPM, melalui beberapa hal diantaranya dengan melakukan percepatan penyelesaian perda tentang RTR wilayah provinsi/kabupaten/kota, penyediaan peta, publikasi di media massa, dan beberapa hal lainnya. Upaya pencapaian ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya SPM bidang penataan ruang di tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

g. Referensi

- 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
 - Pasal 13 ayat (2) huruf g
 - Pasal 60 huruf a
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

XII. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Kabupaten/Kota)

a. Pengertian

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana (RTR masing-masing kabupaten/kota).

b. Ruang Lingkup

- 1. Indikator Penyediaan RTH Publik adalah persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
- 2. Sasaran Penyediaan RTH Publik adalah Meningkatnya ketersediaan RTH.
- 3. Penyediaan RTH Publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- 4. Tata cara penyediaan RTH Publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

c. Target Capaian

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan RTH Publik di tingkat kabupaten dan kota adalah 50% pada Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota telah menyediakan RTH publik sebanyak 50% dari seluruh luasan yang ditargetkan dalam perda tentang RTRW kabupaten/kota.

Cara perhitungan pencapaian target:

$$\label{eq:SPM_Penyedian_RTH_Publik} \begin{split} & \frac{\sum_{akhirtahunpencapaian} SPM_{Luasan} \ RTH \ publik \ yang \ tersedia}{\sum_{wil.kota/kawasanperkotaan} Luasan \ RTH \ publik \ yang \ seharusn} X \ 100\% \end{split}$$

Keterangan:- Pembilang : Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah

RTH publik yang tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

 Penyebut : Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan adalah luasan RTH publik sesuai amanat UU 26/2007 yaitu 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

- Ukuran Konstanta : Persen (%)

d. Cara Mengukur

Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian SPM pada daerahnya adalah melalui survey. Survey tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan SPM di daerah.

e. Upaya Pencapaian

Langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai target penyediaan SPM melalui beberapa hal diantaranya dengan melakukan penertiban area yang direncanakan menjadi RTH dan penganggaran penyediaan dan pengelolaan RTH publik. Upaya pencapaian ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya SPM bidang penataan ruang di tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

f. Referensi

- 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
 - Pasal 17 ayat (5)
 - Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL NOMOR 01/PRT/M/2014 REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III TENTANG

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

E Kebutuhan air irigasi (lt/detik) berdasarkan rencana tata tanam X Ketersediaan air irigasi (lt/detik) pada setiap musim tanam

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat JENIS PELAYANAN DASAR

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (Provinsi atau Kabupaten/Kota) 70% Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019

INDIKATOR SPM

SASARAN

RUMUS SPM

ON.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
а	PEMBINAAN	Pelatihan Kepala ranting / pengamat, petugas mantri / juru pengairan, petugas operasi bendung, petugas pintu air, dll.	A = Biaya yang dibutuhkan untuk melatih kepala ranting / pengamat, petugas mantri / juru pengairan, petugas operasi bendung, petugas pintu air, dll. B = Banyaknya pelatihan yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan air irigasi. Rumus : A x B	Mengacu kepada Permen PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
၁	PEMBANGUNAN			
C:1	C.1 PERENCANAAN REHABILITASI	1. Pelaksanaan Identifikasi Kerusakan dan Penelusuran Jaringan	A = Biaya per hari yang dibutuhkan dalam identifikasi kerusakan dan Penelusuran Jaringan Irigasi untuk mengetahui tingkat kerusakan . B = Lamanya identifikasi kerusakan dan Penelusuran Jaringan Irigasi dalam hari.	Mengacu kepada Permen PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		2. Pelaksanaan pengukuran	A = Biaya per hektare (ha) yang dibutuhkan dalam pengukuran kerusakan jaringan sistem irigasi B = Luas jaringan sistem irigasi yang rusak dalam hektare (ha) Rumus : A x B	Mengacu kepada Standar
		3. Pembuatan detail desain dan rencana anggaran biaya rehabilitasi jaringan irigasi	A = Biaya per hektare (ha) yang dibutuhkan dalam pembuatan detail desain perbaikan jaringan irigasi B = Luas jaringan sistem irigasi yang akan didesain dalam hektare (ha) Rumus: AxB	Ferencanaan mgasi uan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
		 Penyusunan program/rencana kerja yang memuat pembagian peran dan tanggung jawab Dinas pengelola irigasi dan P3A/GP3A 	,	Mengacu kepada Permen
		5, Penyusunan pelaporan	A = Biaya yang dibutuhkan untuk membuat dokumen pelaporan hasil kegiatan perencanaan rahabilitasi jaringan irigasi B = Banyaknya dokumen pelaporan hasil kegiatan perencanaan rahabilitasi jaringan irigasi. Rumus: A x B	PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

۶	NANOGROZ	VETTADAN	CATTIAN (DIAVA	VETEDANCAN
: -		near control	aind hound	
T CC	C.2 PELAKSANAAN REHABILITASI	Penyelenggaraan Sosialisasi tentang pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi kepada petani.		
		2. Pelaksanaan Rehabilitasi bendung	11 11	Mengacu kepada Permen PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan
		3. Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi	A = Biaya per meter yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi B = Panjang Saluran Irigasi yang di rehabilitasi dalam meter (m) Rumus : A x B	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		4. Pelaksanaan Rehabilitasi bangunan irigasi	A = Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rehabilitasi satu unit bangunan irigasi B = Banyaknya unit bangunan irigasi yang direhabilitasi Rumus : A x B	
q	Pengawasan	1. Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi	A = Biaya per hektare (ha) yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Operasi jaringan irigasi B = Luas jaringan irigasi dalam hektare (ha) Rumus : A x B	Monocon Trans do Domeson
		2. Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	A = Biaya per hektare (ha) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi B = Luas jaringan sistem irigasi dalam hektare (ha) Rumus : A x B	wengacu kepada retinen 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
		3, Pelaksanaan Konservasi DAS	A = Biaya per hektare (ha) yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Konservasi DAS B = Luas DAS dalam hektare (ha) Rumus : A x B	

NO	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BLAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
户	PEMBERDAYAAN	Pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (Komisi Irigasi, Instansi Pemerintah Bidang Irigasi, dan perkumpulan petani pemakai air)	A = Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan satu kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi. B = Banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi. Rumus : A x B	Mengacu kepada Permen PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

 Σ Ketersediaan Air Baku (m 3 /tahun) dari Instalasi Pengolah Air

∑ Kebutuhan Air Baku (m³/tahun) berdasarkan Target MDGs

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat

Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (kabupaten/kota) 100%

INDIKATOR SPM TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019

JENIS PELAYANAN DASAR

SASARAN

RUMUS SPM

Ñ	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
П	2	8	4	5
KE	KEGIATAN : Pembangunan Sistem Jaringan Air Baku(m3/tahun)	3/tahun)		
∢	PENGATURAN			
1.	Penyusunan keputusan Kepala Daerah terkait penyediaan air	Penyusunan keputusan kepala daerah	A = Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan keputusan Kepala Daerah terkait penyediaan air baku untuk	
	baku untuk kebutunan pokok minimal sehari-hari		kebutuhan pokok minimal sehan-han Rumus : A	
ø	PEMBINAAN			
	-	-	-	
Ç	PEMBANGUNAN			
0.1	C.1 SURVAI DAN INVESTIGASI			
1.	 Pelaksanaan Kegiatan Survei Potensi dan Studi Penvediaan Air 	Pelaksanaan Survei Potensi dan Studi Penvediaan Air Baku	A = Biaya yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Survei Potensi dan Studi Penyediaan Air Baku per lokasi	
	Baku			
			B = Banyaknya lokasi yang akan dilaksanakan survei	
			Furns: A x B	
0.2	C.2 DESAIN			
1.	1. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan	A = Biaya yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan kegiatan	
	perencanaan detail engineering	penyusunan Detail Engineering	penyusunan Detail Engineering Design per lokasi	
	gesign untuk Pembangunan/Peningkatan	Leagn	R = Ranvaknya lokasi yang akan dilaksanakan	
	Sistem Jaringan Penyediaan Air			
	S a ku		$\texttt{Rumus}: \texttt{A} \times \texttt{B}$	
Ċ E	C.3 PENGADAAN LAHAN			
1.	Pelaksanaan Kegiatan penyediaan Jahan (pemilihan lokasi dan	1. Pembebasan/Penyiapan Lahan	,	
	pembebasan lahan)	2. Sertifikasi lahan yang telah		Tanggung Jawab kegiatan penyediaan lahan diserahkan
		dibebaakan		kepada pemerintah Kabupaten/kota

Ľ				
Q E	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
П	2	3	4	O
Ω̈́	C.4 KONSTRUKSI			
1.	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku sesuai perencanaan teknis	1. Pembangunan Bangunan Tampungan Air	A = Biaya yang dibutuhkan untuk Pembangunan tiap unit Bangunan Tampungan Air B = Banyaknya unit Bangunan Tampungan Air yang dibangun Rumus: A x B	
		2. Pembangunan Bangunan Pengambilan/Penyadapan	A = Biaya yang dibutuhkan untuk Pembangunan tiap unit Bangunan Pengambilan/Penyadapan	
			B = Banyaknya unit Bangunan Pengambilan/Penyadapan yang dibangun Rumus : A x B	
		3 Pembanginan Ranginan	Δ = Rious using dibutuhben untuk satu unit Dembengunen	
			ı	
		Transmisi	B = Banyaknya unit Bangunan Pelengkap yang dibangun Rumus : A x B	
			National Control of the Control of t	
			A = Biaya yang dibutuhkan untuk Pembangunan tiap satu	
			meter caringan iransmiss	
			B = Panjang Jaringan Transmisi yang dibangun dalam	
			meter (m) Rumus : A x B	
		4. Pembangunan Sistem	C = Biaya yang dibutuhkan untuk Pembangunan satu unit	
		pemompaan	Sistem pemompaan	
			N = Banyaknya unit Sistem pemompaan yang dibangun Rumus : A x B	
ပိ	C.5 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN			
1.	Pelaksanaan Kegiatan Operasi &	1. Pelaksanaan Operasi Sistem A	A = Biaya yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Operasi	
	Pembangunan/Peningkatan	Daku	Sistem Canngan renyemaan An Baku per tokasi	
	Sistem Jaringan Penyediaan Air		B = Banyaknya lokasi Sistem Jaringan Penyediaan Air	
	ny ng		Baku Rumus A v R	
		2. Pelaksanaan Pemeliharaan	A = Biaya yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan	
		Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku	Pemeliharaan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku per lokasi	
			B = Banyaknya lokasi Sistem Jaringan Penyediaan Air	
			Baku Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan Konservasi	A = Biaya yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Konservasi	
		Sumber Air		
			B = Luas lokasi konversı sumber air dalam hektar (ha)	
			Kumus : A x B	

õ	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	8	4	ю
Δ	D PENGAWASAN			
i	Pelaksanaan Kegiatan pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku sesuai perencanaan teknis	Pengawasan Teknis	A = Biaya yang dibutuhkan untuk biaya 1 kegiatan pengawasan Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku Rumus : A	
臼	E PEMBERDAYAAN			
	-	-	-	

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB BIDANG JALAN

			aktir tatun pencapaian SPM Sanjang Jalan memenuhi Kondisi Jalan Baik dan Sedang	
E CH	KOMOS SEM	Srivi Kondisi Jalan	eksistrg Panjang Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota	
JEN SAS! INDI TAR	JENIS PELAYANAN DASAR : SASARAN SPM : INDIKATOR SPM : TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019 :	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi/Kabupaten/Kota Tingkat kondisi jalan baik dan sedang 60%	i kebutuhan masyarakat jalan Provinsi/Kabupaten/Kota edang	
NO	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANG
-	23	8	4	9
A.1.	A PERSIAPAN KECIATAN PEMELIHARAAN A.1. Pembelian alat (Naasra/ Romdas/ 1. Roughometer)	LAN 1. Pemilikan alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer)	A. Jumlah alat yang dibutuhkan B. Rata-rata biaya pembelian alat Rumust A x B	
A.2.	Penyusunan dokumen pemeliharaan	1. Penyelesaian dokumen pemeliharaan rutin	A. Jumlah dokumen pemeliharaan rutin B. Rata-rata hiaya penyusunan dokumen pemeliharaan rutin Rumus: 4 x B	
		2. Penyelesaian dokumen pemeliharaan berkala	A. Jumlah dokumen pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya penyusunan dokumen pemeliharaan berkala Rumus: A x B	
m	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN	JEMBATAN		
B.1.	Pelakanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jalan dengan perkerasan HRS-Base	Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan HRS- Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	
		Pelaksanaan pemeliharaan rutiin jalan perkerasan HRS- Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan nutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkeraaan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan HRS- Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lobar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lobar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	
		4. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan HRS-Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemelharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkeraaan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkeraaan HRS-Base Rumus: A x B	
		Pelaksanaan pemeliharaan rutii jalan perkerasan HRS- Basa dengan lobar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeriharaan rutin B. Rata-rata bisya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebat perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	

NO.	KOMPONEN	KE	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2		3	4	6
B.2.	. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jalan dengan perkerasan Asphait Concrete (AC)	Pelaksar rutin jal Asphalt dengan sampai	pemeliharaan rkerasan rete (AC) perkerasan n 4,5 m dan	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		bahu 2 x 1 m 2. Pelaksanaan	bahu 2 x 1 m Pelaksanaan pemeliharaan	Rumus; A x B A. Total panians ialan (km) vang dilakukan	
			rutin jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC)	pemeliharan tutin Pe Rafa-rafa biawa pemeliharaan nutin 1 km ialan	
		dengan	dengan lebar perkerasan	dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m;	
		sampai denga bahu 2 x 1 m	sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m	lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC) Rumus: A x B	
		3. Pelaksa	Pelaksanaan pemeliharaan	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
		rutin jal	rutin jalan perkerasan	pemeliharaan rutin	
		Asphalt	Asphalt Concrete (AC)	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan	
		dengan	dengan lebar perkerasan	dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m;	
		sampai	sampai dengan 6,0 m dan	lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		bahu $2 \times 1,5 \text{ m}$	k 1,5 m	Rumus: A x B	
		4. Pelaksa	naan pemeliharaan	Pelaksanaan pemeliharaan A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
		rutin jal	rutin jalan perkerasan	pemeliharaan rutin	
		Asphalt	Asphalt Concrete (AC)	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan	
		dengan	dengan lebar perkerasan	dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m;	
		sampai	sampai dengan 7,0 m dan	lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		bahu $2 \times 2 \text{ m}$	×2 m	Rumus: A x B	
		5. Pelaksa	naan pemeliharaan	Pelaksanaan pemeliharaan A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
		rutin jal	rutin jalan perkerasan	pemelliharaan rutin	
		Asphalt	Asphalt Concrete (AC)	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan	
		dengan	dengan lebar perkerasan	dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m;	
		sampai	sampai dengan 14 m dan	lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		bahu 2 x 2 m	k2 m	Rumus: A x B	

ON	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	8	4	9
B.3.	B.3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jalan dengan perkerasan kaku (rigid navement)	Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan kaku (figid pavement) danaan lahan menjampan	Pelaksanaan pemeliharaan A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan rutin jalan perkerasan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan	
		sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m	ucugan touar persecasan sampa ucugan 4,0 m, lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan 	₹.	
		kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m;	
		sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m	lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan	Pelaksanaan pemeliharaan A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
		rutin jalan perkerasan kaku (rigid pavement)	pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km ialan	
		dengan lebar perkerasan	dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m;	
		sampai dengan 6,0 m dan	lebar bahu $2 \times 1,5 \text{ m}$; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement)	
		m c,1 x z unad	Kumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan 	Pelaksanaan pemeliharaan A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan rutin jalan perkerasan pemeliharaan rutin	
		kaku (rigid pavement)	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan	
		dengan lebar perkerasan samasi dengan 70 m dan	dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; labar baba, 9 × 9 m; dan ianis narbarasan baba, hinid navamanti	
		bahu 2 x 2 m	Ruffins; A x B	
		- 1		
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan kaku fricid bavementh 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin	
		dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan	E. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; tahan baha, 0 km dan jamia manjamanan baha, bising mananan	
		banu z k z m	Rumus; A x B	

ON	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	0	4	ę
B.4.	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jalan dengan perkerasan tanpa penutup (unpaved)	Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkeraaan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan tanpa pemutup (unpaved) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B	

Š	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	6
B.5.	. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar	 Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas A 	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan gelagar kelas A Rumus: A x B	
		2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas B	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan gelagar kelas B Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas C	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan gelagar kelas C Rumus: A x B	
В.б.	. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka	1, Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan rangka kelas A Rumus: A x B	
		2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan rangka kelas B Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan rangka kelas C Rumus: A x B	
B.7.	. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan komposit kelas A	
		2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin. 1 m jembatan komposit kelas B Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan komposit kelas C Rumus; A x B	

NO	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	8	4	ę
c	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DAN JEM	N JEMBATAN		
C.1.	C.1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan perkerasan HRS- Base	Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS-Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m	Pelaksanaan pemeliharaan A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan berkela jalan perkerasan pemeliharaan berkala HRS-Base dengan lebar B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan perkerasan sampai dengan lebar perkerasan sampai dengan lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan HRS-Base	
	•	2. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS-Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m		
		3. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS-Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m 4. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS-Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m 7,0 m dan bahu 2 x 2 m	Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan (km) yang dilakukan berkala jalan perkerasan pemeliharaan berkala perkerasan sampai dengan lebar bahu 2 x 1,5 m dan bahu 2 x 1,5 m pemeliharaan perkala jalan perkerasan pemeliharaan perkerasan pemeliharaan perkerasan sampai dengan lebar perkerasan sampai dengan lebar perkerasan sampai dengan lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan HRS-Base dengan lebar perkerasan sampai dengan lebar perkerasan sampai dengan lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B Rata-rata biaya pemeliharaan berkala jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS-Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemelliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	

NO	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	23	83	4	ą
C.2.	C.2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan perkerasan Asphalt Concrete (AC)	Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan lebar perkerasan bahu 2 x 1 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC) Rumus: A x B A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC) Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC) Rumus: A x B	
		4. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC) Rumus: A x B	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemelliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC) Rumus; A x B	

NO	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	83	4	9
	C.3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement)	Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemelliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemelliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala I km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	
		4. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement)	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	 A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	

Ş	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-		e	. 4	9
C.4.	. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan perkerasan tanpa penutup (unpaved)	Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkeraaan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkeraaan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 1,0 m dan bahu 2 x 1 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala I km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved)	
		 Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaanberkala 1 km jalan dengan 1ebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B	
C.S.	C.5. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jembatan gelagar	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jembatan gelagar kelas A Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jembatan gelagar	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m jembatan gelagar kelas A A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
	•	kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jembatan gelagar kelas C	jembatan gelagar kelas B A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m jembatan gelagar kelas C Rumus: A x B	

Ş	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	23	83	4	9
C.6.	C.6. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk	 Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala 	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan berkala	
	jembatan rangka	untuk jembatan rangka	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
		Kelas A	jembatan rangka Kelas A Rumus: A x B	
		Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
		pemeliharaan berkala	pemeliharaan berkala	
		untuk jembatan rangka	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
		kelas B	jembatan rangka kelas B	
			Rumus: A x B	
		Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
		pemeliharaan berkala	pemeliharaan berkala	
		untuk jembatan rangka	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
		kelas C	jembatan rangka kelas C	
			Rumus: A x B	
C.7.	C.7. Pelaksanaan kegiatan	 Pelaksanaan kegiatan 	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
	pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala	pemeliharaan berkala	
	jembatan komposit	untuk jembatan komposit	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
		kelas A	jembatan komposit kelas A	
			Rumus: A x B	
		Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
		pemeliharaan berkala	pemeliharaan berkala	
		untuk jembatan komposit	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
		kelas B	jembatan komposit kelas B	
			Rumus: A x B	
		Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
		pemeliharaan berkala	pemeliharaan berkala	
		untuk jembatan komposit	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
		kelas C	jembatan komposit kelas C	
			Rumus: A x B	

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB BIDANG JALAN

			skhir tahun pencapaian SPW Panjang Jalan memenuhi pendhubung pusat pusat kediatan dan pusat produksi	kegiatan dan pusat produksi
Į,	KOMOS SPM	SPIN KONEKCIVICAS WILAYAN =	$\sum torget$ kesekaruhan. \sum Panjang Jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	iatan dan pusat produksi
SAS IND	JENIS PELAYANAN DASAR SASARAN SPM INDIKATOR SPM	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota: Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat pr	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota	ovinsi/Kabupaten/Kota
<u> </u>	GET PENCAPA	: 100%		
Š	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	6
Ą	PERSIAPAN KEGIATAN PEMELIHARAAN	AAN		
A.1.	. Pembelian alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer)	1. Pemilikan alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer)	A. Junlah alat yang dibutuhkan B. Rata-rata biaya pembelian alat Rumus: A x B	
A.2.	. Penyusunan dokumen nemeliharaan	1. Denvelecaian dokumen	A. Juniah dokunen peneliharaan rutin B. Pata-rata hiava nenvusunan dokumen nemeliharaan nutin	
	4	pemeliharaan rutin	Rumus: A x B	
		2. Penyelesaian dokumen	A. Jumlah dokumen pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya penyusunan dokumen pemeliharaan	
		pemeliharaan berkala	berkala Rumus: A x B	
m	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN	DAN JEMBATAN		
B.1.	B.1. Pelaksanaan kegiatan	1. Pelaksanaan pemeliharaan	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
	pemeliharaan rutin untuk jalan dengan perkerasan HRS-Base	rutin jalan perkerasan HRS- Rase dengan lebat perkerasan	pemeliharaan rutin B. Rata-rata hiava nemeliharaan rutin 1 km ialan	
	4 D	sampai dengan 4.5 m dan hahu	i	
		2 x 1 m		
			Rumus: A x B	
		2. Pelaksanaan pemeliharaan	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
		rutin jalan perkerasan HRS-		
		Base dengan lebar perkerasan	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dan alah melanggan sama dan ga	
		sampar dengan o,o m dan banu 2 × 1 m	dengan tebar perkerasan sampat dengan o,o m; lebar babu 2 × 1 m; dan jenis perkerasan HRS-Base	
			Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
		rutin jalan perkerasan HRS- Rase dengan lebat perkerasan	pemeliharaan rutin B. Rata-rata biava pemeliharaan rutin 1 km islan	
		sampai dengan 6,0 m dan bahu	dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m;	
		2 x 1,5 m	lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan HRS-Base	
			Rumus: A x B	
		4. Pelaksanaan pemeliharaan	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
		1 um jaran perkerasan nko-		
		base dengan lebat perkerasan sambai dengan 7.0 m dan bahu	B. Kata-rata maya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m;	
		ZxZm	lebar baku 2 x 2 m; dan jenis perkerasan HRS-Base	
			Rumus: A x B	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan	
		rutin jalan perkerasan HKS-	pemeliharaan rutin	
		sampai dengan 14 m dan bahu		
		2×2m	lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan HRS-Base	
			Rumus: A x B	

Ş	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	ę
B.2.	B.2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jalan dengan perkerasan Asphalt Concrete (AC)	 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar baku 2 x 1 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m 	 A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC) Rumus: A x B 	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan jebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampal dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemelliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	

Š	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	8	4	ę
В.3.	B.3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement)	 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan peneliharaan rutin B. Rata-rata biaya peneliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan kaku (figid pavement) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 × 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan kaku (figid pavement)	

Š	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	.3	4	6
B.4.	B.4. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jalan dengan perkerasan tanpa penutup (unpaved)	 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemelliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar baku 2 x 1 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved)	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan peneliharaan rutin B. Rata-rata biaya peneliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar baku 2 x 1 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved)	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar batu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan 1char perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved)	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan rutin B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar batu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved)	

S. Polabanan Polaban	1	Manousion		A CON A TOTAL OF A CAMPAGE A	WA CWALTERSTY
1. Pelaksannaan kegatan A. Total panjang jembatan tutin m jembatan pemeliharaan rutin untuk pemeliharaan rutin untuk pemeliharaan rutin m jembatan m jembatan m jembatan m jembatan m jembatan m jembatan m jembatan rutin m jembatan m jembatan m jembatan rutin m jembatan m jembatan rutin m jembatan m jembatan m jembatan m jembatan m jembatan rutin m jembatan m jembatan m jembatan rutin m jembatan m jembatan rutin m jembatan rutin m jembatan rutin m jembatan rutin m jembatan m jembatan rutin m	<u></u> } -	ROMFONEN	AELOMAN 2	SALVAN BIAIR	AET ENANOAN
1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas C pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan tangka kelas C 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C	-	2	2	T	Q.
jembatan gelagar kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas C jembatan gelagar kelas C pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan tangka kelas C Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C	B.5.	Pelaksanaan kegiatan		A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan kemposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B		pemelinaraan rutin untuk	pemenharaan ruth untuk	pemenharaan rum	
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan tangka kelas C 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C		Jembatan gelagar	jembatan gelagar kelas A	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan	
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan tangka kelas C 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C				gelagar kelas A	
2. Pelaksanaan kegataan 3. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 1. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 1. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 1. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 1. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 1. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 1. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan 1. Pelaksanaan kegatan 9. Pelaksanaan kegatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 1. Pelaksanaan kegatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 9. Pelaksanaan kegatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				Kumus; A x B	
jembatan gelagar kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C				A. Fotal panjang jembatan (m) yang dilakukan	
3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas C pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C pemeliharaan rutin untuk jembatan kemposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C			pemeliharaan rutin untuk	pemeliharaan rutin	
3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C			jembatan gelagar kelas B	B. Kata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan	
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan gelagar kelas C Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan kemposit kelas A pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				gelagar kelas B	
3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C		1		Rumus: A x B	
ttuk Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan Peneliharaan rutin untuk pemeliharaan rutin untuk				A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
jembatan gelagar kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B			pemeliharaan rutin untuk	pemeliharaan rutin	
1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C			jembatan gelagar kelas C	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan	
1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan tangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan rutin untuk jembatan komposit kelas C jembatan komposit kelas C				gelagar kelas C	
1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C 3. Pelaksanaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				Rumus: A x B	
pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan tangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C 3. Pelaksanaan regiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C	B.6.	Pelaksanaan kegiatan		A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
jembatan rangka kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C		pemeliharaan rutin untuk	pemeliharaan rutin untuk	pemeliharaan rutin	
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B		jembatan rangka	jembatan rangka kelas A	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan	
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B gemeliharaan rutin untuk				rangka kalas A	
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B				Rumus: A x B	
pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C 3. Pelaksanaan regiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				A. Total traniang tembatan (m) yang dilakukan	
jembatan rangka kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 6. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				pemeliharaan rutin	
3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B imbatan komposit kelas B			iembatan tanoka kelas B	B. Rata-rata hiaya pemeliharaan mitin 1 m iembatan	
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C			T CONTRACT TOTAL T	tandka kalas B	
3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B iembatan komposit kelas B gemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				Printing A & B	
tuk pemeliharaan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B pemeliharaan rutin untuk				A Trade of the second contraction of the second districtions	
pemeinaraan rutin untuk jembatan rangka kelas C 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas B				A. 10tal panjang jembatan (m) yang quakukan	
ituk 1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B			pemeliharaan rutin untuk	pemelinaraan rutin	
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B S. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C			jembatan rangka kelas C	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan	
1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B jembatan komposit kelas C				rangka kelas C	
1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B				Rumus: A x B	
pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C	B.7.	Pelaksanaan kegiatan		A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
jembatan komposit kelas A 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B 3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C		pemeliharaan rutin untuk	pemeliharaan rutin untuk	pemeliharaan rutin	
Pelaksanaan kegiatan peneliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C		jembatan komposit	jembatan komposit kelas A	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan	
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				komposit kelas A	
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				Rumus: A x B	
pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas B Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C			Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
jembatan komposit kelas B Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C			pemeliharaan rutin untuk	pemeliharaan rutin	
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C			jembatan komposit kelas B	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan	
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				komposit kelas B	
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin untuk jembatan komposit kelas C				Rumus: A x B	
ıtuk las C				A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
E)			pemeliharaan rutin untuk	pemeliharaan rutin	
			jembatan komposit kelas C	B. Rata-rata biaya pemeliharaan rutin 1 m jembatan	
Rumus; A x B				komposit kelas C	
				Rumus: A x B	

Š	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	6
Ç	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DAN JEMBATAN	JEMBATAN		
C.1.	C.J. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan perkerasan HRS-Base	Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkeraaan HRS- Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan peneliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus; A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS- Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS- Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan peneliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	
		4. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS- Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan peneliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan HRS- Base dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemelliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan 1ebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan HRS-Base Rumus: A x B	

Š	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	ę
C.2.	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan perkerasan Asphalt Concrete (AC)	Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		 Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC) Rumus: A x B	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan Jebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		4. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan peneliharaan berkala B. Rata-rata biaya peneliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan Asphalt Concrete (AC) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan Asphalt Concrete (AC)	

õ	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	9
C.3.	C.3. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement)	 Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemelliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement)	
		 Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan kaku (figid pavement)	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement)	
		 Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan kaku (rigid pavement) Rumus: A x B	
		 Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m 	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan kaku (tigid pavement)	

٤	Nanodhoz	VELHADAN	SATITAN/BIANA	WE TREBANCAN
-			STATES STATES	4
C 4	C.4. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan perkerasan tanpa penutup (unpaved)	berkala jalan perkerasan tanpa berkala jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m dan bahu 2 x 1 m Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m dan bahu 2 x 1 m m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 4,5 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved) Rumus: A x B A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 5,0 m; lebar bahu 2 x 1 m; dan jenis perkerasan tanpa penutup (unpaved)	
		3. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan tanpa pemuhip (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m dan bahu 2 x 1,5 m 4. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m dan bahu 2 x 2 m	A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 6,0 m; lebar bahu 2 x 1,5 m; dan jenis perkerasan tanpa pemutup (unpaved) A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 7,0 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan tanpa pemutup (unpaved) Rumus: A x B	
		5. Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan perkerasan tanpa penutup (unpaved) dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m dan bahu 2 x 2 m	 A. Total panjang jalan (km) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaanberkala 1 km jalan dengan lebar perkerasan sampai dengan 14 m; lebar bahu 2 x 2 m; dan jenis perkerasan tanpa penuhup (unpaved) 	
C.5.	i. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jembatan gelagar	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jembatan gelagar kelas A Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jembatan gelagar kelas B Relaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala untuk jembatan gelagar kelas C jembatan gelagar kelas C	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m jembatan gelagar kelas A A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m jembatan gelagar kelas B A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m jembatan gelagar kelas C Rumus: A x B	

Š	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-		ď	4	ų
1	7	2	*	2
C,6.	C.6. Pelaksanaan kegiatan	l. Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
	pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala	
	jembatan rangka	jembatan rangka kelas A	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
			jembatan rangka kelas A	
			Rumus: A x B	
		Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
		pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala	
		jembatan rangka kelas B	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
			jembatan rangka kelas B	
			Rumus: A x B	
		Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
		pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala	
		jembatan rangka kelas C	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
			jembatan rangka kelas C	
			Rumus: A x B	
C.7.	C.7. Pelaksanaan kegiatan	 Pelaksanaan kegiatan 	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
	pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala	
	jembatan komposit	jembatan komposit kelas A	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
			jembatan komposit kelas A	
			Rumus: A x B	
		Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
		pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala	
		jembatan komposit kelas B	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
			jembatan komposit kelas B	
			Rumus: A x B	
		Pelaksanaan kegiatan	A. Total panjang jembatan (m) yang dilakukan	
		pemeliharaan berkala untuk	pemeliharaan berkala	
		jembatan komposit kelas C	B. Rata-rata biaya pemeliharaan berkala 1 m	
			jembatan komposit kelas C	
			Rumus: A x B	

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB BIDANG CIPTA KARYA

 Σ Masyarakat terlayani (pada akhir tahun pencapaian SPM) Σ Proyeksi Total Masyarakat (pada akhir tahun pencapaian SPM) SPM Cakupan Pelayanan = RUMUS SPM

Penyediaan Air Minum JENIS PELAYANAN DASAR SASARAN SPM

Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 81, 77%INDIKATOR SPM TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019

οN	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
н	2	8	4	ES.
¥	PENGATURAN			
1.	Penetapan Rencana Induk SPAM untuk percepatan pencapaian MDGs	Rencana Induk SPAM	A. Jumlah paket kegiatan penyusunan RI SPAM B. Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan RI SPAM Rumus : A x B	
2.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada)	Jakstrada	A. Jumlah paket kegiatan penyusunan Jakstrada B. Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Jakstrada Rumus : A x B	
က်	Penyusunan program dan perencanaan kerja	Program dan rencana kerja pencapaian target SPM air minum dengan mengacu Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah dan RI SPAM	A. Jumlah pertemuan penyusunan program dan rencana kerja pencapaian target SPM air minum B. Rata-rata biaya pertemuan Rumus : A x B	
М	PEMBINAAN			
1.	Fasilitasi Penyusunan RI SPAM	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	A. Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM B. Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM Rumus : A x B	
6.	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan	Terselenggaranya Sosialisasi	 A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan Rumus : A x B 	
ဎ	PEMBANGUNAN			
<u>ပ</u>	C.1 SURVAI DAN INVESTIGASI			
	Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pengembangan SPAM	Studi Kelayakan/Feasibility Study	A. Jumlah dokumen FS B. Rata-rata biaya 1 penyusunan FS Rumus : A x B	
C.2	C.2 DESAIN			
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (detail engineering design) untuk pengembangan SPAM	Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design	A. Jumlah dokumen DED B. Rata-rata biaya 1 kegiatan DED	

δÑ	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	8	4	5
c.3	PENGADAAN LAHAN			
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM	Pembebasan Lahan	A. Luas area yang dibebaskan (ha) B. Rata-rata biaya pembebasan lahan per-ha Rumus : A x B	
C.4	KONSTRUKSI			
	Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis	Persiapan Pelaksanaan konstruksi	A. Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi B. Organisasi kerja	
		Kontrak	A. Jumlah kegiatan paket lelang B. Rata-rata biaya 1 kegiatan paket lelang Rumus : A x B	
		Dana Daerah untuk Urusan Bersama	Total Dana Daerah yang dibutuhkan untuk melengkapi pelayanan SPAM sampai kepada masyarakat	
		Pembangunan unit air baku	A. Total kapasitas unit air baku (liter/detik) B. Rata-rata biaya pembangunan unit air baku 1 liter/detik sesuai jenis unit air baku yang akan dibangun Rumus : A x B	
		Pembangunan perpipaan fransmisi air baku	A. Total panjang pipa transmisi air baku (km) Pembangunan perpipaan transmisi B. Rata-rata biaya pembangunan pipa transmisi air baku 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan Rumus : A x B	
		Pembangunan unit produksi	A. Total kapasitas unit produksi (liter/detik) B. Rata-rata biaya pembangunan unit produksi 1 liter/detik sesuai jenis dan bahan unit produksi yang akan dibangun, termasuk sistem perpompaan yang digunakan Rumus : A \times B	
		Pembangunan reservoir	A. Total kapasitas reservoir $\{m^3\}$ B. Rata-rata biaya pembangunan reservoir 1 m^3 sesuai jenis dan bahan yang akan digunakan Rumus : A x B	
		Pembangunan unit distribusi	A. Toʻal panjang pipa distribusi (km) B. Rata-rata biaya pembangunan pipa distribusi 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan, termasuk aksesosris pipa Rumus : A x B	
		Pembangunan unit pelayanan:		
		- Hidran Umum/Terminal Air	A. Toʻal jumlah HU/TA yang akan dibangun B. Rata-rata biaya pembangunan 1 HU/TA yang sesuai dengan kapasitas rencana Rumus : A \times B	
		- Sambungan Rumah	A. Toʻal jumlah SR yang akan dibangun B. Rata-rata biaya pembangunan 1 SR Rumus : A x B	

ON	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
C.5	C.5 OPERASIONAL			
	Pembentukan organisasi pengelola SPAM	A. Jumlah daerah yang mendapaf organisasi pengelola SPAM B. Rata-rata biaya pendampingan Rumus : A x B	A. Jumlah daerah yang mendapatkan pendampingan pembentukan organisasi pengelola SPAM B. Rata-rata biaya pendampingan Rumus : A x B	
2	Tersedianya biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD	Alokasi Anggaran SKPD di APBD	Besaran biaya operasioanl/Tahun	
ر 9.	PEMELIHARAAN			
	Dukungan subsidi tarif bagi PDAM Alokasi Subsidi tarif sampai dengan tarif belum Full Cost Recovery dengan tarif FCR sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006	Alokasi Subsidi tarif sampai dengan tarif FCR sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006	A. Besaran selisih tarif rata-rata dengan Harga Pokok Produksi B. Volume Produksi Rumus : A x B	
Ω	PENGAWASAN			
	Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan	Air hasil produksi SPAM memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes	A. Jumlah sampling pengujian kualitas air yang dilakukan B. Rata-rata biaya sampling pengujian kualitas air Rumus : A x B	
ы	PEMBERDAYAAN			
	Pembentukan lembaga pengelola tingkat desa	Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola SPAM di perdesaan	A. Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan pembentukan pengelola SPAM Perdesaan B. Rata-rata biaya pendampingan Rumus : A x B	
62	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPAM (terutama SPAM perdesaan)	A. Panduan proses pemberdayaan masyarakat B.Fasilitasi untuk pendampingan masyarakat	A. Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat B. Rata-rata biaya pemberdayaan Rumus : A x B	

100% Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 60% 🗵 jumlah penduduk yang dilayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL terpusat ∑ jumlah total penduduk kabupaten/kota : SPM tingkat pelayanan = Penyediaan Sanitasi TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019 JENIS PELAYANAN DASAR RUMUS SPM INDIKATOR SASARAN

NO L	KOMPONEN 2	KELUARAN 3	SATUAN/BIAYA 4	KETERANGAN 5
	PENGATURAN			
	1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan perda terkait air limbah	Penyusunan Kebijakan	A. Jumlah paket kegiatan penyusunan Perda B. Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Perda Rumus : A x B	
		Sosialisasi/Konsultasi Publik	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi Perda B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi Perda Rumus : A x B	
	PEMBINAAN			
i.	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis terkait air limbah	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	A. Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis Perda B. Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis Perda Rumus: A x B	
		Penyelenggaraan Sosialisasi/Kampanye Edukasi	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi Perda B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi Perda Rumus : A x B	

1. Petalzsanaan kegatan survat dan limbah limbah C.2. BESAIN L. Petalzsanaan kegatan perencanaan limbah C.2. DESAIN L. Petalzsanaan kegatan perencanaan limbah pengusunan Pra Feasibility Shudy Penyusunan Pra Feasibility Shudy Penyusunan Peasibility Shudy Penyusunan Detail Engineering Design Penyusunan Peasibility Shudy Penyusunan Detail Engineering Design Penyusunan Detail Engineering Design Penyusunan Peasibility Shudy Peny	NO	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
i dan Inan air Persiapan Survai dan Investigasi Pelaksanaan Survai dan Investigasi Penyusunan Master Plan Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Peasibility Study Penyusunan Detail Engineering Design Ituk	1	61	ю	4	5
i dan Inan air Persiapan Survai dan Investigasi Pelaksanaan Survai dan Investigasi Penyusunan Master Plan Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Pra Basibility Study Penyusunan Detail Engineering Design Ituk Penyusunan Detail Engineering Design	၁				
asan kegiatan survai dan si untuk pembangunan air Pelaksanaan Survai dan Investigasi Pelaksanaan Survai dan Investigasi Penyusunan Master Plan Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Feasibility Study Penyusunan Pra Feasibility Study	C.1	SURVAI DAN INVESTIGASI			
Pelaksanaan Survai dan Investigasi Penyusunan Master Plan Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Feasibility Study Penyusunan Pera Feasibility Study Penyusunan Detail Engineering Design	;;	Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pembangunan air limbah	Persiapan Survai dan Investigasi	Jumlah dokumen persiapan survai dan investigasi	
Penyusunan Master Plan Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Feasibility Study Penyusunan Feasibility Study gineering design untuk Penyusunan Detail Engineering Design			Pelaksanaan Survai dan Investigasi	A. Jumlah paket kegiatan survai investigasi pembangunan air limbah setempat B. Rata-rata biaya 1 kegiatan pelaksanaan survai dan investigasi Rumus : A x B	
Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Feasibility Study laan kegiatan perencanaan gineering design untuk gunan air limbah Penyusunan Detail Engineering Design			Penyusunan Master Plan	A. Jumlah dokumen MP B. Rata-rata biaya 1 kegiatan MP Rumus : A x B	
naan kegiatan perencanaan gineering design untuk gunaan air limbah Penyusunan Detail Engineering Design			Penyusunan Pra Feasibility Study	A. Jumlah dokumen Pra FS B. Rata-rata biaya 1 kegiatan Pra FS Rumus : A x B	
aan kegiatan perencanaan gineering design untuk gunan air limbah Penyusunan Detail Engineering Design			Penyusunan Feasibility Study	A. Jumlah dokumen FS B. Rata-rata biaya 1 kegiatan FS Rumus : A x B	
Penyusunan Detail Engineering Design	C.2	DESAIN			
	i,	Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan air limbah	Penyusunan Detail Engineering Design	A. Total jurnlah unit yang dibuat perencanaan DED B. Rata-rata biaya per-unit perencanaan DED Rumus : A x B	

Ñ	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	ы	3	4	5
C.3	C.3 PEMBEBASAN LAHAN			
i,	Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan	Pemilihan/Penetapan Lokasi	Luas area yang akan dibebaskan (ha)	
	pembebasan lahan) untuk pembangunan air limbah	Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)	Jumlah dokumen rencana persiapan pembebasan lahan	
		Pembebasan/Penyiapan Lahan	A. Luas area yang dibebaskan (ha) B. Rata-rata biaya pembebasan lahan per-ha Rumus : A x B	
C.4	C.4 KONSTRUKSI			
1.	Pembangunan sarana prasarana sistem air limbah	Pembangunan septik tank	A. Jumlah septiktank yang dibangun B. Rata-rata biaya pembangunan satu unit septiktank Rumus : A x B	
		Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	A. Jumlah IPLT yang dibangun B. Rata-rata biaya pembangunan satu unit IPLT Rumus : A x B	
		Pembangunan sambungan rumah	A. Jumlah sambungan rumah B. Rata-rata biaya tiap sambungan rumah Rumus : A x B	
		Pembangunan jaringan perpipaan	A. Panjang jaringan perpipaan tergantung diameter pipa B. Rata-rata biaya panjang pipa per meter tergantung diameter pipa Rumus : A x B	untuk masing-masing diameter dijumlahkan dan tergantung pada metode konstruksi
		Pembangunan rumah pompa	A. Jumlah pompa yang diperlukan B. Rata-rata biaya rumah pompa per 1 unit pompa Rumus : A x B	rumah pompa; pompa berikut bangunannya
		Pembangunan IPAL	A. Jumlah Populasi Ekivalen (PE) yang terlayani B. Rata-rata biaya pembangunan IPAL per PE Rumus : A x B	

8	OKOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
	1 2	3	4	5
Ú	C.5 OPERASI DAN PEMELIHARAAN			
П	1. Pelaksanaan kegiatan penyedotan lumpur tinja	Penyedotan lumpur tinja	A. Jumlah ritasi per satu unit truck penyedot tinja B. Rata-rata biaya Rp/m3 lumpur tinja Rumus : A x B	
CN.	2. Pelaksanaan kegiatan pengolahan lumpur tinja	Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan IPA. Kapasitas IPLT (m3) B. Rata-rata biaya pen IPLT (Rp/m3) Rumus : A x B	PA. Kapasitas IPLT (m3) B. Rata-rata biaya pengolahan lumpur tinja di IPLT (Rp/m3) Rumus : A x B	
က	Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sistem air limbah terpusat	Pembangunan sambungan rumah	-	tanggung jawab masing-masing pemilik rumah/persil
		Pembangunan jaringan perpipaan	A. Panjang jaringan perpipaan B. Rata-rata biaya pemeliharaan pipa per meter Rumus : A x B	
		Pembangunan rumah pompa	A. Jumlah unit pompa yang diperlukan B. Rata-rata biaya pemeliharaan per 1 rumah pompa Rumus : A x B	
		Pembangunan IPAL	A. Jumlah air limbah yang masuk ke IPAL (m3) B. Rata-rata biaya pengolahan air limbah per m3 Rumus : A x B	
ರ	C.6 PEMANTAUAN			
-	Pelaksanaan kegiatan pemantauan hasil efluen	Pemantauan efluen	A. Jumlah sampling efluen B. Rata-rata biaya sampling Rumus : A x B	

1				
2 -	POMPONEN 2	3	SALUAN) BIAIA 4	hel ekan kan
Ω	PENGAWASAN			
- i	Pengawasan pembangunan sarana prasana air limbah	Pembangunan septiktank	A. Jumlah septiktank yang dibangun tercantum dalam IMB B. Rata-rata biaya IMB Rumus : A x B	
		Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	A. Jumlah IPLT yang dibangun B. Rata-rata biaya pengawasan pembangunan satu unit IPLT Rumus : A x B	
		Pembangunan sambungan rumah	A. Jumlah sambungan rumah B. Rata-rata biaya pengawasan tiap sambungan rumah Rumus : A x B	
		Pembangunan jaringan perpipaan	A. Panjang jaringan perpipaan B. Rata-rata biaya pengawasan pemasangan pipa per meter Rumus : A x B	tergantung pada metode konstruksi
		Pembangunan rumah pompa	A. Jumlah rumah pompa yang diperlukan B. Rata-rata biaya pengawasan pembangunan per 1 rumah pompa Rumus : A x B	rumah pompa: pompa berikut bangunannya
		Pembangunan IPAL	A. Jumlah unit IPAL yang dibangun B. Rata-rata biaya pengawasan pembangunan IPAL per unit Rumus : A x B	disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan
臼	PEMBERDAYAAN			
- i	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan Sosialisasi	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat Rumus : A x B	
		Pendampingan masyarakat	A. Jumlah paket kegiatan pendampingan masyarakat B. Rata-rata biaya 1 kegiatan pendampingan masyarakat Rumus : A x B	

100% \sum jumlah penduduk yang dilayani k \mathbf{g} i \mathbf{x} an pengurangan volume sampah > jumlah total penduduk perkotaan SPM pengurangan sampah = Penyediaan Sanitasi JEMS PELAYANAN DASAR RUMUS SPM

Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan Persentase pengurangan sampah di perkotaan 20% INDIKATOR SPM TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019 SASARAN

Ŀ				
2		VARIABEL	KOMPONEN	KETEKANGAN
1	2	8	4	מו
<	PENGATURAN			
ij	Pelaksanaan kegiatan penyusunan perda terkait pengelolaan sampah	Penyusunan Kebijakan	A. Jumlah paket kegiatan penyusunan Perda terkait pengelolaan sampah B. Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Perda terkait pengelolaan sampah Rumus : A x B	
		Penyelenggaraan Sosialisasi/Konsultasi Publik	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi Perda terkait pengelolaan sampah B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi Perda terkait pengelolaan sampah Rumus : A x B	
Д	Pembinaan			
ਜ	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis terkait pengelolaan sampah	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	A. Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis pengurangan sampah B. Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis pengurangan sampah Rumus : A x B	
		Penyelenggaraan Sosialisasi/Konsultasi Publik	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi kegiatan pengurangan sampah B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi pengurangan sampah Rumus : A x B	
Ç	PEMBANGUNAN			
Ċ.	C.1 PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN STUD	DI KELAYAKAN		
ij	Penyuaunan Masterplan dan Studi Kelayakan	Penyusunan Master Plan	A. Jumlah dokumen MP B. Rata-rata biaya 1 kegiatan MP Rumus : A x B	Masterplan terkait dengan pengelolaan sampah skala kota
		Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas 3R	A. Jumlah dokumen Studi Kelayakan B. Rata-rata biaya 1 kegiatan Studi Kelayakan Rumus : A x B	Jumlah unit fasilitas 3R yang diperlukan sesuai dengan hasil Masterplan

ဋ္ဌ -				
-	KOMPONEN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
-	CI	8	4	מו
C.2 P	C.2 PEMBEBASAN LAHAN			
1. P	Pelaksanaan kegiatan seleksi lokasi dan	Seleksi dan penetapan lokasi	Luas lahan yang akan dibebaakan (m^2)	
ልቭ	pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas 3R	Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)	Dokumen rencana persiapan pembebasan lahan	
		Pembebasan/Penyiapan Lahan	A. Luas lahan yang akan dibebaskan (m^2) B. Rata-rata biaya pembebasan lahan per- m^2 Rumus : A x B	
C.3	C.3 DESAIN			
1. P	Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail		A. Jumlah unit fasilitas 3R yang akan disusun	
<u>ர</u> ந	engneering deagn (DED) untuk pembangunan fasilitaa 3R	Penyusunan DED	DED-nya B. Rata-rata biaya penyusunan DED per-unit	
			fasilitas 3R Rumus : A x B	
C.4 K	C.4 KONSTRUKSI			
1. F &	Pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas 3R	Pembangunan fasilitas 3R	A. Jumlah fasilitas 3R yang dibangun B. Rata-rata biaya pembangunan per unit fasilitas 3R Rumus : A x B	biaya pembangunan fasilitas 3R sudah termasuk biaya pengadaan peralatan dan supervisi
Ç.5	OPERASI DAN PEMELIHARAAN			
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan fasilitas 3R	Kegiatan operasional fasilitas 3R (pengumpulan, pemilahan, pengomposan, pembuatan produk daur ulang)	A. Jumlah pekerja pada fasilitas 3R B. Upah pekerja pada fasilitas 3R per bulan Rumus : A x B	
		Pengangkutan residu	A. Jumlah residu yang diangkut ke TPA (m3) B. Rata-rata biaya pengangkutan residu sampah/m3 Rumus : A x B	
		Kegiatan pemeliharaan fasilitas 3R (pembayaran air, listrik, pembelian bahan bakar, perbaikan peralatan, dll)	A. Biaya pembayaran air per bulan B. Biaya pembayaran listrik per bulan. C. Biaya pembelian bahan bakar per bulan Biaya perbaikan peralatan per bulan E. Biaya lainnya untuk operaaional fasilitas 3R Rumus: A+B+C+D+E	

ON	KOMPONEN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3	4	מ
۵	PENGAWASAN DAN EVALUASI			
1.	Pelaksanaan kegiatan pengawasan (monitoring) pengurangan sampah di fasilitas 3R	Pengawasan pengurangan sampah di fasilitas 3R	A. Jumlah fasilitas 3R yang dibangun B. Rata-rata biaya monitoring per fasilitas 3R Rumus : A x B	
1.	Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengurangan sampah di fasilitas 3R	Evaluasi efisiensi pengurangan sampah di fasilitas 3R	A. Jumlah fasilitas 3R yang dibangun B. Rata-rata biaya penyusunan dokumen evaluasi per fasilitas 3R Rumus : A x B	
ы	PEMBERDAYAAN			
<u></u>	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pengurangan sampah	Penyelenggaraan Sosialisasi	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi kegiatan pengurangan sampah B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi kegiatan pengurangan sampah Rumus : A x B	
		Pendampingan masyarakat	A. Jumlah paket kegiatan pendampingan masyarakat terkait pengurangan sampah B. Rata-rata biaya 1 kegiatan pendampingan masyarakat terkait pengurangan sampah Rumus : A x B	

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

 \sum jumlah penduduk yang dilayani kegiatan pengangkutan sampah \sum jumlah to tal penduduk perkotaan SPM pengangkutan sampah = RUMUS SPM

Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan Persentase pengangkutan sampah 70% Penyediaan Sanitasi INDIKATOR SPM : TARGET PENCAPAIAN TAHUN 20 : JENIS PELAYANAN DASAR SASARAN

NO	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	5
Ą	A PENGATURAN			
	1			
щ	PEMBINAAN			
	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis terkait pengangkutan sampah	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	A. Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis terkait pengangkutan sampah B. Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis terkait pengangkutan sampah Rumus : A x B	
		Penyelenggaraan Sosialisasi dan Kampanye	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi Rumus : A x B	

ON	komponen	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	8	4	5
၁	PENGANGKUTAN SAMPAH			
C.1	PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAI	C.1 PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN SISTEM PENGANGKUTAN SAMPAH		
1.	Penyusunan Studi Kelayakan Sistem Pengangkutan Sampah	Penyusunan Feasibility Study	A. Jumlah dokumen Studi Kelayakan B. Rata-rata biaya 1 kegiatan Studi Kelayakan Rumus : A x B	Studi Kelayakan antara lain mencakup: 1. rute pengangkutan sampah yang efektif dan efisien 2. jenis alat pengangkut sampah yang dibutuhkan
C.2	PENGADAAN ALAT			
1.	Pengadaaan alat pengangkut sampah	Pengadaan Alat pengangkut sampah (dump truck, arm B. Harga per unit alat pengangkut roll truck, dan compactor truck) Rumus : A x B	A. Jumlah unit alat pengangkut sampah B. Harga per unit alat pengangkut sampah Rumus : A x B	
D	OPERASI DAN PEMELIHARAAN			
1.	Pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	Pengangkutan sampah di perkotaan	A. Jumlah alat pengangkut sampah B. jumlah operator per alat pengangkut sampah Rumus : A x B	
			A. Jumlah alat pengangkut sampah B. Biaya bahan bakar per alat pengangkut sampah Rumus : A x B	
2.	Pemeliharaan alat pengangkutan sampah	Pemeliharaan alat pengangkut sampah	A. Jumlah alat pengangkut sampah B. Rata-rata biaya pemeliharaan per alat pengangkut sampah Rumus : A x B	Termasuk servis berkala dan pembelian suku cadang

KETERANGAN	5					
SATUAN/BIAYA	4		A. frekuensi kegiatan pengawasan pengangkutan sampah B. Rata-rata biaya pengawasan pengangkutan sampah Rumus : A x B	A. Jumlah dokumen evaluasi sistem pengangkutan sampah B. Rata-rata biaya penyusunan dokumen evaluasi sistem pengangkutan sampah Rumus : A x B		A. Frekuensi kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat Rumus : A x B
KELUARAN	8		Pengawasan sistem pengangkutan sampah	Evaluasi sistem pengangkutan sampah		Sosialisasí
komponen	2	PENGAWASAN DAN EVALUASI	Pelaksanaan kegiatan pengawasan (monitoring) sistem pengangkutan sampah di perkotaan	Pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pengangkutan sampah di perkotaaan	SOSIALISASI	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
ON	ī	æ	1.	2.	Œ	i.

(koefisien pengoperasian TPA x 40%) + koefisien kualitas pengolahan lindi x 40%) + (koefisien penanganan gas x 20%) SPM pengoperasian TPA = RUMUS SPM

Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan Penyediaan Sanitasi JENIS PELAYANAN DASAR SASARAN

Persentase pengoperasian TPA 70% INDIKATOR SPM TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019

ON	KOMPONEN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<	PENGATURAN			
	-			
m	PEMBINAAN			
1.	Pelaksanaan kegiatan pembinaan		A. Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis	
	teknis terkait pengoperasian TPA		pengoperasian TPA	
		Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	yelenggaraan Bimbingan Teknis B. Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis	
			pengoperasian TPA	
			Rumus: A x B	
			A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi/kampanye	
		Comment of the commen	pengoperasian TPA	
		renycienggaraan Sociolioosi (Yomnomes	B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi pengoperasian	
		Sosialisasi/ nampanye	TPA	
			Rumus: A x B	
၁	PEMBANGUNAN			
ن	C.1 PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN			
1.	1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan		A frameh defendence Studi Kelendi Kelenden	
	Studi Kelayakan pembangunan TPA	Penvusunan Sfudi Kelavakan	A. Suman dokumen Studi kelayakan B. Biaya penyusunan studi kelayakan pembangunan TPA	
			Rumus: A x B	

ON	KOMPONEN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
г	2	3	4	c)
C.2	C.2 PEMBEBASAN LAHAN			
ij	1. Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan Pemilihan/penetapan lokasi	Pemilihan/penetapan lokasi	Luas area yang akan dibebaskan (ha)	berdasarkan RTRW dan SNI
	untuk pembangunan TPA	Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)	Junlah Dokumen rencana persiapan pembebasan lahan	
		PembebasanLahan	A. Luas lahan yang akan dibebaskan (ha) B. Rata-rata biaya pembebasan lahan per-ha Rumus : A x B	
C.3	C.3 PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN	. 2		
ri.	Pelaksanaan Kegiatan penyusunan dokumen lingkungan untuk pembangunan TPA	Penyusunan dokumen lingkungan	A. Jumlah dokumen lingkungan B. Biaya penyusunan dokumen lingkungan pembangunan TPA dengan luas > 10 ha TPA dengan luas > 10 ha	TPA dengan luas > 10 ha merupakan wajib AMDAL TPA dengan luas < 10 ha
			Rumus: A x B	memerlukan UKL/UPL
ဂ 4	C.4 DESAIN			
i,	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Detailed Engineering Design (DED)		A. Jumlah dokumen DED	
	pembangunan TPA	Penyusunan DED	B. Biaya penyusunan DED pembangunan TPA Rumus : A x B	
C.5	C.5 KONSTRUKSI			
i.	Pelaksanaan kegiatan pematangan 1. lahan untuk pembangunan TPA	Pematangan lahan untuk pembangunan TPA	A. Luas area pemafangan lahan (ha) B. Biaya pemafangan lahan per ha Rumus : A x B	

ON	KOMPONEN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
-		8	4	to.
2	Pelaksanaan kegiatan pembangunan TPA	Pembangunan sel landfill	A. Kubikasi sel landfill yang dibutuhkan untuk menampung sampah yang masuk (m3) B. Rata-rata biaya pembangunan sel landfill per m3 Rumus : A x B	termasuk cut and fill, lapisan kedap, perpipaan lindi, dan perpipaan gas
		Pembangunan instalasi pengolah lindi (IPL)	A. Kubikasi IPL yang dibutuhkan untuk mengolah produksi lindi (m3) B. Rata-rata biaya pembangunan IPL per m3 Rumus : A x B	
		Pengadaan Alat Berat	A. Jumlah unit alat berat B. Harga alat berat per unit Rumus : A x B	
		Pembangunan bangunan penunjang	A1. Bangunan penunjang ke-1 A2. Bangunan penunjang ke-2 Bangunan penunjang ke-3 Bangunan penunjang ke-3 Bangunan penunjang ke-1 B2. Biaya pembangunan penunjang ke-1 B3. Biaya pembangunan bangunan penunjang ke-2 B3. Biaya pembangunan bangunan penunjang ke-2 Bn. Biaya pembangunan bangunan penunjang ke-3 Rn. Biaya pembangunan bangunan penunjang ke-3 Rumus: X ((A1xB1)+(A2xB2)+(A3xB3)+(AnxBn))	
Q	PENGAWASAN DAN EVALUASI			
i i	Pelaksanaan kegiatan pengawasan (monitoring) pengurangan sampah di fasilitas 3R	Pengawasan pengurangan sampah di fasilitas 3R	A. Jumlah fasilitas 3R yang dibangun B. Rata-rata biaya monitoring per fasilitas 3R Rumus : A x B	
2	Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengurangan sampah di fasilitas 3R	Evaluasi efisiensi pengurangan sampah di fasilitas 3R	A. Jumlah fasilitas 3R yang dibangun B. Rata-rata biaya penyusunan dokumen evaluasi per fasilitas 3R Rumus : A x B	

ON	KOMPONEN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3	4	ڻ ک
C.6	PENGAWASAN			
1.	Pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan TPA	Pengawasan pembangunan TPA	A. Luas area TPA yang terbanguna (ha) B. Rata-rata biaya pengawasan pembangunan TPA per-ha Rumus : A x B	termasuk pembangunan sel landfill, IPL dan pembangunan bangunan penunjang
ä	OPERASI DAN PEMELIHARAAN			
i	Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan TPA	Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan blok landfill	A. Luas sel landfill yang dioperasikan secara sanitary/controlled landfill dalam ha B. Biaya pengoperasian sel landfill secara sanitary/controlled landfill per ha Rumus : A x B	Berdasarkan PP No. 16/2005, TPA untuk kota besar dan metropolitan harus dioperasikan secara sanitary landfill. Sedangkan untuk kota kecil dan sedang, TPA dioperasikan minimal secara controlled landfill.
		Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan unit pengolah lindi	A. Volume lindi yang diolah (m3) B. Rata-rata biaya pengolahan lindi per m3 Rumus : A x B	
		Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan unit penanganan gas	A. Volume gas metan yang tertangani (m3) B. Rata-rata biaya penanganan gas metan per m3 Rumus : A x B	Unit penanganan gas termasuk jaringan perpipaan penangkap gas dan alat pengukur gas
		pelaksanaan bangunan penunjang pemeliharaan bangunan penunjang	A1. Bangunan penunjang ke-1 A2. Bangunan penunjang ke-2 Bangunan penunjang ke-3 Bangunan penunjang ke-3 Bangunan penunjang ke-n Bangunan penunjang ke-n B2. Biaya operasi dan pemeliharaan bangunan penunjang ke-1 B2. Biaya operasi dan pemeliharaan bangunan penunjang ke-2 B3. Biaya operasi dan pemeliharaan bangunan penunjang ke-n Baya operasi dan pemeliharaan bangunan penunjang ke-n Rumus: \(\mathbb{Z}\)	

ON	KOMPONEN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
П	2	3	4	υ
囟	PENGAWASAN DAN EVALUASI			
1,	Pelaksanaan kegiatan		A. jumlah sampling efluen	
	pengawasan/pemantauan hasil	Pemantauan efluen lindi	B. rata-rata biaya sampling	
	pengolahan lindi, gas, dan kepadatan		Rumus: A x B	
	lalat			
			A. jumlah sampling gas	
		Pemantauan emisi gas	B. rata-rata biaya sampling	
			$Rumus: A \times B$	
c	Dalotzoon on tramioton amolinori		A Timple definition amiliani nanconancion TDA	
á	remoneration TDA		n. Outman wondings treatment pengoperasian 11.0.	
	pengoperasian 1 rA	Evaluasi sistem pengoperasian 1FA berdasarkan hasil pemantauan	Evaluasi sistem pengoperasian 1174 B. Kata-tata biaya penyusunan dokumen evaluasi berdasarkan hasil pemantauan pengoperasian TPA	
		4	Rumus: AxB	
æ	SOSIALISASI			
1.	 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengoperasian TPA 	Sosialisasi pengoperasian TPA	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi pengoperasian TPA	
			B. Kata-rata biaya 1 Kegiatan sosiansasi pengoperasian Trba	
			Rumus: A x B	

100% 100% \sum Luasan daerah masih tergenang (A) \sum Luas daerah rawan genangan (B) $\frac{\sum \text{ Jumlah penduduk yang terlayan! (A)}}{\sum \text{ Jumlah penduduk seluruh kota (B)}}$ SPM Cakupan Pelayanan = SPM Cakupan Pelayanan = Penyediaan Sanitasi JENIS PELAYANAN DASAR RUMUS SPM

TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019

SASARAN INDIKATOR SPM

50%

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan

õ	KOMPONEN	KELUARAN	KOMPONEN	KETERANGAN
-	п	8	4	ID.
4	PENGATURAN			
l-i	Pelaksanaan kegiatan penyusunan perda terkait pembangunan drainase	Penyusunan Kebijakan	A. Jumlah paket kegiatan penyusunan Perda B. Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Perda Rumus : A x B	
		Penyusunan Master Plan	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi Perda/kampanye edukasi B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi Perda Rumus: AxB	
м	PEMBINAAN			
i-i	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis terkait pembangunan drainase	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	A. Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis Perda B. Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis Perda Rumus: AxB	
		Penyelenggaraan Sosialisasi/Kampanye Edukasi	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi Perda B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi Perda Rumus : Ax B	

PEMBANGUNAN SURVAI DAN INVESTIGASI Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pembangunan drainase Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase PEMBEBASAN LAHAN PELABBASAN LAHAN PELABBASAN LAHAN PEMBEBASAN LAHAN PERBEBASAN LAHAN PERBEBASAN LAHAN PEMBEBASAN LAHAN PERBEBASAN LAHAN	ON	KOMPONEN	KELUARAN	KOMPONEN	KETERANGAN
PEMBANGUNAN Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pembangunan drainase Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase Penyusunan Detail Engineering Design Penyusunan Detail Engineering Design (Pernyusunan Detail Engineering Design untuk pembangunan drainase Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase Penyusunan Detail Engineering Design Penyusunan Detail Engineering Design (Pernilihan lokasi dan pembebasan lahan) Pelaksanaan kegiatan penbediaan lahan Pelaksanaan kegiatan penbediaan lahan Pelaksanaan kegiatan penbediaan lahan Penyusunan Arainase Penyusunan Arainase Penyusunan Detail Engineering Design (Pernilihan lokasi dan pembebasan lahan) Penyusunan Arainase Penyusunan Detail Engineering Design (Pernilihan lokasi dan pembebasan lahan) Penyusunan Arainase Penyusunan Detail Engineering Design (Pernilihan lokasi dan pembebasan lahan) Penyusunan Arainase	-	2	8	4	5
Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pembangunan drainase Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase PEMBEBASAN LAHAN PElaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase PEMBEBASAN LAHAN Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering Design Penyusunan Detail Engineering Design Penyusunan drainase PEMBEBASAN LAHAN Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan Penyusunan drainase Perangan Pembebasan lahan Penyusunan daministrasi) Perangan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi) Pembebasan/Penyiapan Lahan	၁	PEMBANGUNAN			
Pelaksanaan kegiatan survai dan DESAIN Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail Penyusunan Master Plan Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Peasibility Study Penyusunan Detail Bngineering Design Penyusunan Detail Bngineering Design Penyusunan Detail Bngineering Design Penyusunan Detail Bngineering Design Penyusunan Administrasi) Periapan Pembebasan Lahan Pembebasan/Penyiapan Lahan	C.1	SURVAI DAN INVESTIGASI			
Pelaksanaan Survei dan Investigasi Penyusunan Master Plan Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Pra Feasibility Study Penyusunan Peasibility Study Penyusunan Detail Engineering Design Penyusunan Detail Engineering Design Penyusunan Detail Engineering Design Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan Penyusunan drainase Pembebasan Lahan Penyusunan drainase Pembebasan Lahan Penyusunan drainase Pembebasan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi)		Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pembangunan drainase		Jumlah dokumen persiapan survei dan investigasi	
Penyusunan Master Plan Penyusunan Pra Feasibility Study Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase PEMBEBASAN LAHAN Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase Periaksanaan Lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase Periaksanaan Lahan (Periapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi)				 A. Jumlah paket kegiatan survei investigasi perencanaan sistem drainase B. Rata-rata biaya 1 kegiatan pelaksanaan survei dan investigasi Rumus: AxB 	
Penyusunan Pra Feasibility Study Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineeting design untuk pembangunan drainase PEMBEBASAN LAHAN Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi) Persiapan Lahan Pembebasan/Penyiapan Lahan				A. Jumlah dokumen MP B. Rata-rata biaya 1 kegiatan MP drainase Rumus : A x B	
Penyusunan Feasibility Study Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase PEMBEBASAN LAHAN Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase Persiapan Pembebasan Lahan (kepanitiaan dan Dokumen Administrasi) Persiapan Pembebasan Lahan (pembebasan Lahan (pembebasan Lahan dan Dokumen Administrasi)				A. Jumlah dokumen Pra FS B. Rata-rata biaya 1 kegiatan Pra FS Rumus : A x B	
Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase PEMBEBASAN LAHAN Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase untuk pembangunan drainase Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi) Pembebasan/Penyiapan Lahan				A. Jumlah dokumen FS B. Rata-rata biaya 1 kegiatan FS Rumus : A x B	
Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase PEMBEBASAN LAHAN Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase dan Dokumen Administrasi) Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi)	0.2	DESAIN			
PEMBEBASAN LAHAN Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase untuk pembangunan drainase Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi) Pembebasan/Penyiapan Lahan	1.	Pelaksanaan kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase		A. Total jumlah sub sistem yang dibuat perencanaan DED B. Rata-rata biaya per sub sistem perencanaan DED Rumus : A x B	
Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan) (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi) Pembebasan/Penyiapan Lahan	C.3	PEMBEBASAN LAHAN			
Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi) Pembebasan/Penyiapan Lahan		Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan)		Luas area yang akan dibebaskan (ha)	
		untuk pembangunan drainase	Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Administrasi)	Jumlah dokumen rencana persiapan pembebasan lahan	
a x w : sniiinul				A. Luas area yang dibebaskan (ha) B. Rata-rata biaya pembebasan lahan per- ha Rumus : A x B	

ΟN	KOMPONEN	KELUARAN	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
C.4	KONSTRUKSI			
i.	Pembangunan prasarana drainase	Pembangunan Saluran Drainase lebar < 1.5 m	A. Panjang saluran drainase B. Rata-rata biaya Pembangunan Saluran Drainase Per m Rumus : A x B	
		Pembangunan Saluran Drainase 1.5 m < lebar < 6 m	A. Panjang saluran drainase B. Rata-rata biaya Pembangunan Saluran Drainase Per m Rumus : A x B	
		Pembangunan Saluran Drainase lebar > 6 m	A. Panjang saluran drainase B. Rata-rata biaya Pembangunan Saluran Drainase Per m Rumus : A x B	
		Pembangunan kolam retensí	A. Luas kolam retensi B. Rata-rata biaya per m2 Rumus : A x B	
		Pemasangan pompa	 A. Kebutuhan pompa per jenis/kapasitas B. Rata-rata biaya pompa per jenis/kapasitas Rumus: Σ (A x B) 	

잁	KOMPONEN	KELUARAN	KOMPONEN	KETERANGAN
-	2	8	4	5
2,	Pelaksanaan Normalisasi/ Rehabilitasi Saluran Drainase	Normalisasi Saluran Drainase lebar < 1.5 m	A. Panjang saluran drainase B. Rata-rata biaya Pembangunan Saluran Drainase Per m Rumus : A x B	
		Normalisasi Saluran Drainase 1.5 m < lebar < 5 m	A. Panjang saluran drainase B. Rata-rata biaya Pembangunan Saluran Drainase per m Rumus : A x B	
		Normalisasi Saluran Drainase lebar > 5 m	A. Panjang saluran drainase B. Rata-rata biaya Pembangunan Saluran Drainase Per m Rumus : A x B	
		Normalisasi rehabilitasi kolam retensi	A. Luas kolam retensi B. Rata-rata biaya per m2 Rumus : A x B	
		Rehabilitasí pompa	 A. Kebutuhan pompa per jenis/kapasitas B. Rata-rata biaya pompa per jenis/kapasitas Jenis/kapasitas Rumus : Σ (A x B) 	
C.5	OPERASI DAN PEMELIHARAAN			
	Pelaksanaan O&M prasarana dan sarana drainase	Pelaksanaan Kegiatan O&M terkait dengan kondisi fisik, saluran dgn lebar < 6 m	A. Jumlah paket kegiatan O&M B. Rata-rata biaya per kegiatan O&M (Rp) Rumus : A x B	
		Pelaksanaan Kegiatan O&M terkait dengan kondisi fisik, saluran dgn lebar > 6 m	A. Jumlah paket kegiatan O&M B. Rata-rata biaya per kegiatan O&M (Rp) Rumus : A x B	
		Pelaksanaan O&M Pompa	A. Besarnya debit yang ditangani B. Biaya rata-rata per m3 debit (Rp) Rumus : A x B	

0 N	KOMPONEN	KELUARAN	KOMPONEN	KETERANGAN
-	2	3	4	5
Δ	PENGAWASAN TEKNIS			
ļ.;	Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Saluran dan Pembangunan Kolam	Pelaksanaan proses konstruksi saluran	A. Total kebutuhan waktu (bulan) selama pembangunan B. Rata-rata biaya pengawasan per bulan Rumus : A x B	
		A. Total kebutuhan waktu (bulan) selama pelaksanaan proses pembangunan kolam rea. Rata-rata biaya pengawasan per bulan Rumus : A x B	A. Total kebutuhan waktu (bulan) selama pembangunan B. Rata-rata biaya pengawasan per bulan Rumus : A x B	
		Pemasangan pompa	A. Total kebutuhan waktu (bulan) selama pembangunan B. Rata-rata biaya pengawasan per bulan Rumus : A x B	
臼	PEMBERDAYAAN			
:	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan Sosialisasi	 A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat B. Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat Rumus: AxB 	
		Pendampingan masyarakat	A. Jumlah paket kegiatan pendampingan masyarakat B. Rata-rata biaya 1 kegiatan pendampingan masyarakat Kumus : A x B	

100% : Penataan Bangunan dan Lingkungan : Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung : Persentase Jumlah IMB yang diterbitkan : 50% Eangunan gedung di kabupaten/kota ∑ IMB yang diterbitkan INDIKATOR SPM TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019 JENIS PELAYANAN DASAR RUMUS SPM SASARAN

S	KOMPONEN	KELHARAN	SATIJAN/BIAVA	KETERANGAN
⊣		m	4	LO .
Ą	PENGATURAN			
	Penyusunan Perda Bangunan Gedung	penyusunan Perda Bangunan Gedung	A. Jumlah paket kegiatan penyusunan Perda Bangunan Gedung	Dalam Perda Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
)		B. Rata - rata biaya 1 kegiatan penyusunan Perda Bangunan Gedung	diatur substansi mengenai Izin Mendirikan Bangunan
			Rumus: A x B	Gedung (IMB)
Ä	PEMBINAAN			
	Penyelenggaraan sosialisasi dan Pelatihan	Penyelenggaraan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung	A. Jumlah paket kegiatan sosialisasi Perda Bangunan Gedung	
			b. Kata - rata biaya 1 paket kegiatan sosialisasi Perda Bangunan Gedung	
			$Rumus: A \times B$	
		Penguatan kapasitas petugas	A. Jumlah paket kegiatan pelatihan	
		penerbitan IMB melalui pelatihan	B. Rata - rata biaya 1 paket kegiatan pelatihan	
			Rumus: $A \times B$	
		Pelatihan pendataan bangunan gedung	A. Jumlah paket kegiatan pelatihan	
			B. Rata - rata biaya 1 paket kegiatan pelatihan	
			Rumus: A x B	
ರ	PELAKSANAAN			
	Pelaksanaan penerbitan IMB dan	Penerbitan IMB	A. Jumlah IMB yang diterbitkan	
	pendataan bangunan gedung		B. Rata - rata biaya penerbitan 1 IMB	
			Rumus : A X D	
		Pendataan bangunan gedung		
			A. Jumlah bangunan gedung yang didata B. Rata - rata biaya pendataan 1 bangunan gedung	
			Rumus: $A \times B$	
Ö	PENGAWASAN			
	Pengawasan pelaksanaan Perda Bangunan Gedung	Pengawasan penerapan prosedur penerbitan IMB berdasarkan Perda	A. Jumlah kegiatan pengawasan penerbitan IMB berdasarkan Perda Bangunan Gedung	
		bangunan gedung	b. Kata - rata olaya 1 kegiatan pengawasan penerbitan IMB berdasarkan Perda Bangunan	
			Gedung Rumus : A x B	

RUMUS SPM:

JENIS PELAYANAN DASAR

INDIKATOR SPM

SASARAN

🛭 Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A SPM tingkat pelayanan = 🗕

Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan

TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2019

1				
8	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	νο
4	PENGATURAN			
_	Pemilihan dan penetapan lokasi permukiman kumuh	Pelaksanaan pertemuan pemilihan dan penetapan lokasi permukiman	A. Frekuensi Pertemuan	Penetapan Lokasi dan Luas permukiman kumuh sbg.
			B. Rata-rata biaya penyelenggaraan pertemuan	acuan pencapaian target SPM, ditetapkan melalui peraturan
			Rumus : A x B	atau keputusan bupati/walikota
м	PEMBINAAN			
-	Penyelenggaraan Sosialisasi	Penyelengaraan Sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	
			B. Rata-rata biaya penyelenggaraan sosialisasi	
			Rumus: A x B	
22	Penyelenggaraan Rembug warga	Penyelengaraan Rembug warga	A. Frekuensi rembug B. Rata-rata biaya penyelenggaraan	
			rembug Rumus : A x B	
ບ	PEMBANGUNAN			
C.1	SURVEI DAN INVESTIGASI			
-	Survei Lapangan	Pelaksanaan Survei Lapangan	А. Jumlah lokasi survei lapangan	Hasil survei lapangan
			В. Lama survey lapangan	digunakan untuk mendukung
			C. Frekuensi pengambilan data/ survei	proses perencanaan program
			lapangan	kegiatan dan dan pembuatan
			D. Rata-rata biaya pelaksanaan survei	Peta Rencana - DED
			Lapangan	
			Rumus: A x B x C x D	
		Deleneran Hasil Sumen	A Francisco London London	
		relaporan mash curvey	B. Rata-rata biaya pembuatan Laporan	
			hasil Survei	
			Rumus : A x B	

Š	KOMPONEN	KELHARAN	SATTIAN/RIAYA	KETERANGAN
7	2	3	4	9
62	Perencanaan dan Penentuan program/ kegiatan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaaan	Pertemuan perencanaan dan Penentuan program/ kegiatan	A. Frekuensi pertemuan perencanaan B. Rata-rata biaya penyelengaraan pertemuan perencanaan dan Penentuan program/ kegiatan Rumus: Ax B	Hasil laporan perencanaan termasuk didalamnya berupa Matriks Program
м	Pembuatan Matriks Program			Tenntegrasi dengan proses perencanaan strategi dan Penentuan program/ kegiatan prioritas penanganan kawasan
C.2	DESAIN			
F	Pembuatan Peta Rencana – DED	Решbuatan Peta Rencana – DED	A. Jumlah Peta Rencana dan laporan DED B. Rata-rata biaya pembuatan Peta Rencana - DED Rumus : A x B	
č	DENGADAAN LAHAN			
; :	FENGALAAN LAHAN			
				pengadaan lahan untuk penyelenggaraan infrastruktur dan Rusunawa dalam rangka penanganan kumuh, merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan rencana penanganan
C.4	KONSTRUKSI			
1	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan	Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkungan	A. Standar Panjang Jalan Lingkungan B. Panjang Jalan Lingkungan existing C. Luas Kawasan Kumuh D. Rata-rata biaya Pembangunan Jalan Lingkungan per M2 Rumus: ((A x C) - B) x D	Standar pelaksanaan konstruksi disesuaikan berdasarkan SNI/ Peraturan/ Kebijakan yang berlaku di daerah (Mis: Standar ke butuhan MCK Umum dapat mengacu pada SNI 03-2399-
2/	Pembangunan/ Peningkatan Jalan setapak	Pembangunan/peningkatan Jalan SetlA. Standar Panjang Jalan Setapak B. Panjang Jalan Setapak existing C. Luas Kawasan Kumuh D. Rata-rata biaya Pembangunan v Setapak per M2 Rumus : ((A x C) - B) x D	A. Standar Panjang Jalan Setapak B. Panjang Jalan Setapak existing C. Luas Kawasan Kumuh D. Rata-rata biaya Pembangunan Jalan Setapak per M2 Rumus: ((A x C) - B) x D	1991, tentang lata cara perencanaan bangunan MCK umum)

ğ	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2		, 4	9
60	Pembangunan Saluran/ Drainase	Pembangunan Saluran/ Drainase	A. Standar volume drainase B. Volume drainase existing C. Luas Kawasan Kumuh D. Rata-rata biaya Pembangunan Saluran/ Drainase Per M2 Rumus : ({A x C} - B) x D	
4	Penyediaan akses air minum		A. Standar kebutuhan Jumlah Hidran Umum/ Kran Umum B. Jumlah Hidran Umum/Kran Umum Existing C. Jumlah Penduduk di Kws. Kumuh D. Rata-rata biaya pembangunan HU/KU Rumus: ((A x C) - B) x D	
		paan	A. Jumlah Unit Rumah yang belum terlayani jaringan perpipaan untuk sambungan rumah/ sambungan pekarangan B. Biaya Pengadaan dan Pemasangan jaringan perpipaan untuk sambungan rumah/ sambungan pekarangan	
IO.	Pengembangan Fasilitas pengurangan sampah dan sistem penanganan sampah	ah	A. Standar kebutuhan Jumlah Gerobak sampah B. Jumlah Gerobak Sampah existing C. Jumlah KK di kws. Permukiman kumuh D. Rata-rata biaya pengadaan Gerobak Sampah M2 Rumus : ((A x C) - B) x D	
		pah	A. Standar kebutuhan Jumlah Truk sampah B. Jumlah Truk Sampah existing C. Jumlah KK di kws. Permukiman kumuh D. Rata-rata biaya pengadaan Truk Sampah	
		3) Pembanganan Tempat pembuangan sampah (TPS)	A. Standar kebutuhan Jumlah Tempat pembuangan sampah B. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah existing C. Jumlah KK di kws. Permukiman kumuh D. Rata-rata biaya Pembangunan TPS M2	

Ş	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	a	8	, 4	9
o	Penyediaan Sarana sanitasi individual dan Pembangunan Toilet RT/ MCK Umum A. Standar Kebutuhan Jumlah MCK komunal (Toilet RT/MCK Umum) B. Jumlah McK yang tersedia C. Jumlah Penduduk di Kws. Kumul MC M2 Rumus : ((A x C) - B) x D Rumus : ((A x C) - B) x D Pembangunan Tangki Septik Kumuh yang tidak memiliki tangki septik B. Rata-rata biaya pembangunan Serptik Rumus : A x B Rumus : A x B Rumus : A x B	Pembangunan Toilet RT/ MCK Umum Pembangunan Tangki Septik	A. Standar Kebutuhan Jumlah MCK B. Jumlah MCK yang tersedia C. Jumlah Penduduk di Kws. Kumuh D. Rata-rata biaya pembangunan MCK M2 Rumus: ((A x C) - B) x D A. Jumlah masyarakat (KK) di Kws. Kumuh yang tidak memiliki tangki septik B. Rata-rata biaya pembangunan Septik Tank Rumus: A x B	
-		Pelaksanaan Perbaikan rumah	A. Jumlah Unit Kumah yang tidak layak huni B. Rata-rata biaya Perbaikan rumah Per M2 Rumus : A x B	
ω	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyediaan Ruang terbuka hijau	A. Standar kebutuhan Luas RTH B. Total Luas RTH Existing C. Jumlah Penduduk di Kws. Kumuh D. Rata-rata biaya Pembuatan RTH M2 Rumus: ((A x C) - B) x D	
ص <u>ر</u>	Pembangunan Rusunawa	Ретъвдипап Unit Rusunawa	A. Jumlah KK yang membutuhkan rumah di Kws. Kumuh B. Rata-rata biaya per unit Rusunawa Rumus : A x B	
3 -	ng terkait on)	Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan terkait dengan kegiatan fisik (construction)	A. Jumlah paket kegiatan O&M terkait dengan kegiatan fisik (construction) B. Rata-rata biaya per kegiatan O&M Rumus : A x B	

tegiatan A. Jumlah paket pekerjaan konstruksi B. Rata-rata biaya pengawasan perkegiatan konstruksi Rumus: Ax B Rumus: Ax B Rumus Hx B Rumus A. Jumlah dokumen rencana uh B. Rata-rata biaya pengawasan per
Pelaksanaan pengawasan kegiatan konstruksi Pelaksanaan pemantauan rencana penanganan kawasan kumuh
Pemantauan rencana penanganan Pelaksa kawasan kumuh penang
nan
PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Kegitan/Program Kegiatan/ Program Pemberdayaan Pelaksanaan Kegitan/Program Masyarakat di Kawasan Permukiman Pemberdayaan Masyarakat di

Kebutuhan Pembangunan infrastruktur (selain yang terdapat dalam tabel pada kategori C4 - Construction) terkait dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing

Kumulatif bobot 3 jenis informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada SIPJAKI Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi Persentase tersedianya 3 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi JENIS PELAYANAN DASAR RUMUS SPM

100% TARGET CAPAIAN TAHUN 2019

INDIKATOR SPM SASARAN SPM

NO	KOMPONEN	VARIABEL	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	5
A.		Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Pro⊽insi	Tingkat Provinsi	
-i	1. Penyiapan SDM	a. Penanggung jawab SIPJAKI	A. 1 orang Penanggung jawab B. Honorarium Penanggung Jawab Rumus : A x B	
		b. Administrator SIPJAKI	A. Jumlah administrator SIPJAKI B. Honorarium administrator SIPJAKI Rumus: A x B	
γi	2. Penyiapan Sarana	a. Perangkat Komputer	A. Jumlah perangkat komputer B. Biaya 1 unit perangkat komputer Rumus : A x B	
		b. Perangkat Internet (Modem, LAN/ Wifi)	A. Jumlah perangkat internet (Modem, LAN/ wifi) B. Rata-rata biaya perangkat Internet (Modem, LAN/ wifi) Rumus: A x B	
		c. Paket langganan internet dan pengelolaan per tahun	A. Rata-rata biaya Paket langganan Internet dan pengelolaan per tahun Rumus : A	
က်	. Rapat Koordinasi Caturwulan Pelaksanaan SPM SIPJAKI	Paket kegiatan rapat	A. Jumlah paket kegiatan rapat koordinasi B. Rata-rata biaya 1 paket kegiatan rapat koordinasi Rumus : A x B	
4.	4. Pelaporan	Paket penyusunan laporan	A. Jumlah laporan per 3 (tiga) bulan B. Rata-rata biaya 1 paket penyusunan laporan Rumus : A x B	

NO NO	KOMPONEN	VARIABEL	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
-	2	3	4	5
ij	Monitoring Evaluasi Pelaksanaar	B. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota oleh Provinsi	abupaten/Kota oleh Provinsi	
i.	1. Penyiapan SDM	Tim monitoring dan evaluasi	A. Jumlah anggota tim monitoring dan evaluasi B. Honorarium tim monitoring dan evaluasi Rumus: A x B	
4	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan monitoring dan evaluasi	A. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi B. Belanja bahan C. Perjalanan Dinas D. Akomodasi Rumus : A (B+C+D)	
က်	3. Rapat Koordinasi Tentang Pelaporan Rekapitulasi Caturwulan Kinerja Pelayanan IUJK pada Kabupaten/Kota di Wilavah Provinsi	Paket kegiatan rapat	A. Jumlah paket kegiatan rapat koordinasi B. Rata-rata biaya 1 paket kegiatan rapat koordinasi Rumus : A x B	
4.	4. Pelaporan	Paket penyusunan laporan	A. Jumlah laporan per 3 (tiga) bulan B. Rata-rata biaya 1 paket penyusunan laporan Rumus : A x B	

A. Belanja bahan (ATK, pengadaan fotocopy,

Paket penyusunan laporan

dan lain-lain) Rumus : A

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB BIDANG JASA KONSTRUKSI

Kumulatif bobot 7 jenis informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota pada SIPJAKI Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten Kota JENIS PELAYANAN DASAR SASARAN SPM RUMUS SPM

Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi Dassartasa Porsediana 7 Januara Informasi Inca Kon INDIKATOR SPM

I Y	INDIKATOR SPM : TARGET CAPAIAN TAHUN 2019 :	Persentase Tersedianya 7 Layanan Inforn 60%	Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota 60%	
ON.	KOMPONEN	VARIABEL	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
Н	2	က	4	ß
A.	. Penyelenggaraan Pengembangan	ın Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota	i Tingkat Kabupaten/Kota	
ļ-i	1. Penyiapan SDM	a. Penanggung jawab SIPJAKI	A. 1 orang Penanggung jawab B. Honorarium Penanggung Jawab Rumus : A x B	
		b. Administrator SIPJAKI	A. Jumlah administrator SIPJAKI B. Honorarium administrator SIPJAKI Rumus : A x B	
<u> </u>	2. Hardware	a. Perangkat Komputer	A. Jumlah perangkat komputer B. Biaya 1 unit perangkat komputer Rumus : A x B	
		b. Perangkat Internet (Modem, LAN/ Wifi)	A. Jumlah perangkat internet (Modem, LAN/wifi) B. Rata-rata biaya perangkat Internet (Modem, LAN/wifi) Rumus: A x B	
		c. Paket langganan internet dan pengelolaan per tahun	A. Rata-rata biaya Paket langganan Internet dan pengelolaan per tahun Rumus : A	
က်	3. Rapat Koordinasi Caturwulan Pelaksanaan SPM SIPJAKI	Paket kegiatan rapat	A. Jumlah paket kegiatan rapat koordinasi B. Rata-rata biaya 1 paket kegiatan rapat koordinasi Rumus : A x B	

Pelaporan

Nilai Layanan Dasar IUJK Tingkat Kabupaten/Kota

 Σ Permohonan IUJK yang diterbitkan Paling lama 10 hari kerja setelah Persyaratan Lengkap

🛚 Seluruh permohonan IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap

Izin Usaha Jasa Konstruksi JENIS PELAYANAN DASAR SASARAN SPM

Meningkatnya kualitas layanan perizinan jasa konstruksi

Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap

20% TARGET CAPAIAN TAHUN 2019

INDIKATOR SPM

RUMUS SPM

ON	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	KETERANGAN
-		က	4	S
mi	Penyelenggaraan Layanan Perizinan	inan IUJK		
- i	1. Penyiapan SDM	a. Penanggung jawab pemberian IUJK	A. 1 orang Penanggung jawab B. Honorarium Penanggung Jawab Rumus : A x B	
		b. Verifikator lapangan	A. Jumlah verifikator lapangan B. Honorarium verifikator lapangan Rumus : A x B	
4	2. Pemberian IUJK	a. Kegiatan verifikasi lapangan	A. Jumlah Kegiatan verifikasi lapangan (1 kegiatan x jumlah verifikator) B. Transport lokal Rumus : A x B	
		b. Pemeriksaan dokumen dan kegiatan pemberian IUJK	A. Belanja bahan (blanko, printer, tinta, ATK, dan lain-lain) Rumus: A	
က်	Rapat Koordinasi Caturwulan Pelaksanaan SPM IUJK	Paket kegiatan rapat	A. Jumlah paket kegiatan rapat koordinasi B. Rata-rata biaya 1 paket kegiatan rapat koordinasi Rumus: A x B	
4.	4. Pelaporan	Paket penyusunan laporan	A. Jumlah laporan per 3 (tiga) bulan B. Rata-rata biaya 1 paket penyusunan laporan Rumus : A x B	

Jumlah Peta Analog/Digital x 100% Seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan Jumlah Peta Analog/Digital ∇akhir tahun pencapaian SPM SPM Informasi Peta Analog/Digital = RUMUS SPM

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital. 100% (Provinsi), 100% (Kabupaten/Kota) INDIKATOR SPM SASARAN SPM

BATAS WAKTU PENCAPAIAN TAHUN 2019

NO 1

INFORMASI PENATAAN RUANG

JENIS PELAYANAN DASAR

KOMPONEN	KELUAKAN	SATUAN/ BLAYA	KETEKANGAN
61	8	4	מו
Penyediaan Informasi Penataan Ruang (Pelaksanaan / Pembangunan)			
Persiapan identifikasi kebutuhan pengadaan peta analog dan peta digital	Materi peta analog dan digital RTRW/RDTR/RTR	A. Jumlah paket kegiatan rapat pembahasan B. Rata-rata biaya 1 paket kegiatan rapat pembahasan Rumus : A x B	
Penggandaan peta analog rencana struktur ruang dan rencana pola ruang (untuk display dan album peta): a. KTRW Provinsi Skala 1: b. KTRW Kabupaten Skala 1:50.000 c. RTRW Kota Skala 1:25.000 d. Rencana rinci kab/kota skala 1:5000	Pencetakan, penyajian display	A. Jumlah materi B. Biaya cetak peta analog per m2 C. Biaya cetak album Peta Rumus : (A x B) + (A x C)	
Penggandaan peta digital (minimal format JPEG) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang: a. RTRW Provinsi Skala 1: b. RTRW Kabupaten Skala 1:50.000 c. RTRW Kota Skala 1:25.000 d. Rencana rinci kab/kota skala 1:5000	Penyiapan softcopy	A. Jumlah keping CD B. harga CD dan kemasan Rumus : A x B	
Penyediaan media informasi	Pengadaan unit komputer	A. Jumlah paket unit komputer B. Biaya pengadaan 1 unit komputer Rumus : A x B	
Penyebaran informasi ketersediaan peta analog dan digital	Berita di media cetak dan / atau elektronik	A. Jumlah penayangan atau pemasangan B. Biaya penayangan atau pemasangan 1 kali Rumus : A x B	

	× 100%	
Sokhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH Publik Yang tersedia	SPM Penyediaan RTH Publik = Seluruh wil kota/ kawasan perkotaan	Luasan RTH Publik yang seharusnya
	SPM Penyediaan RTH Publik =	
RUMUS SPM		

: PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH PUBLIK) JENIS PELAYANAN DASAR

: Meningkatnya ketersediaan RTH : Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan BATAS WAKTU PEN INDIKATOR SPM SASARAN SPM

õ

 	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
\vdash	2	ю	4	ro.
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH Publik) (Pelaksanaan)			
	Koordinasi persiapan penyediaan RTH	1. Penggandaan materi	A. Jumlah orang B. Biaya penggandaan Materi Rumus: A x B	
		2. Biaya paket rapat (biaya konsumsi dan sewa ruangan)	A. Jumlah Orang B. Biaya paket rapat per orang Rumus: A x B	
	Peninjauan ke lapangan	Survei	A. Jumlah Orang B. Biaya Transport (pp) C. Biaya Akomodasi D. Vang Harian E. Jumlah Hari Rumus: (A x B) + A (C x (E - 1) + (A x D x E)	
ļ —	Pengadaan Tanah	Pemilihan/penetapan lokasi Persiapan pembebasan lahan (Repanitiaan dan Dokumentasi Administrasi)	Luas (m2, ha) Jumlah dokumen rencana persiapan pembebasan lahan	Mengacu pada Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005
		3. pembebasan/Penyiapan lahan	A. Luas area (m2,Ha) B. Biaya Pembebasan lahan per m2/Ha Rumus: A x B	Tantang Penganaan Tantah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

NO	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	8	4	2
	Pelaksanaan pembangunan RTH	1. Pembentukan dan Pematangan muka tanah	A. Luas (m2, ha) B. Biaya pembentukan dan pematangan lahan per m2/ha Rumus: A x B	
		2. Pengadaan dan Penanaman pohon,perdu dan rumput	A. Jumlah Pohon, luas perdu dan rumput B. Biaya pengadaan dan penanaman Rumus: A x B	
	Pemeliharaan RTH	1. Pembersihan	A. Luas D Dive Bolzet Demolihemen	
		2. Penyiraman	Pr. Diaya I aret I ememanani Rumus: A x B	

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO